



Katalog: 3205022

PENGHITUNGAN DAN ANALISIS KEMISKINAN MAKRO INDONESIA 2016

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

**PENGHITUNGAN DAN ANALISIS
KEMISKINAN MAKRO
INDONESIA
2016**

<http://www.bps.go.id>

PENGHITUNGAN DAN ANALISIS KEMISKINAN MAKRO INDONESIA

2016

ISSN: 2502-7484

Nomor Publikasi: 04340.1604

Katalog: 3205022

Ukuran Buku: 21,5 cm x 28 cm

Jumlah Halaman: xv + 111 halaman

Naskah:

Sub Direktorat Stat. Kerawanan Sosial

Gambar Kulit:

Sub Direktorat Stat. Kerawanan Sosial

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh: -

.....

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional karena masih menjadi keprihatinan banyak pihak. Untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan diperlukan sejumlah indikator yang dapat menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin di Indonesia antar waktu, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin.

Publikasi ini menyajikan metodologi, penghitungan dan analisis angka kemiskinan 2016 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2016. Metodologi dan model analisis sama dengan tahun-tahun sebelumnya supaya dapat dibandingkan perubahan angkanya sehingga dapat perubahan riil lapangan.

Publikasi ini dapat menggambarkan realisasi berkat kerjasama berbagai pihak mulai dari petugas pengumpulan data sampai para ahli yang mengevaluasi dan menganalisis reliabilitas data. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi diucapkan penghargaan tinggi dan terima kasih yang tulus.

Jakarta, Desember 2016

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	2
1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. KAJIAN LITERATUR	5
2.1. Definisi Kemiskinan	5
2.1.1. Kemiskinan Relatif.....	6
2.1.2. Kemiskinan Absolut	7
2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya	8
2.2. Kriteria Kemiskinan	11
2.2.1. Pendekatan Kebutuhan Dasar	11
2.2.2. Pendekatan Non-Moneter (BPS)	13
2.2.3. Pendekatan Keluarga Sejahtera (BKKBN) ...	15
2.2.4. Pendekatan US\$ (Bank Dunia)	16
2.3. Pemetaan Penduduk Miskin	17
2.4. Kemiskinan Multidimensional	18
2.4.1 Pengukuran MPI	19
BAB III. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA	25
3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1999-2016	25

3.2.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2015-Maret 2016	27
3.2.1.	Garis Kemiskinan	27
3.2.2.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	28
3.2.3.	Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan ...	28
3.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia, 1999-2016 ..	29
3.4.	Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia, 1999-2016 ..	32
3.5.	Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran di Indonesia, Tahun 2002 – 2016	33
3.6.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Rata-rata Pengeluaran Perkapita Menurut Status Kemiskinan, Tahun 2015-2016	41
3.7.	Kemiskinan Provinsi Tahun 2016	43
3.8.	Profil Rumah tangga Miskin di Indonesia, Tahun 2016	47
3.8.1.	Karakteristik Sosial Demografi	47
3.8.2.	Karakteristik Pendidikan	50
3.8.3.	Karakteristik Ketenagakerjaan	52
3.8.4.	Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)	57

BAB IV. PENARGETAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	69
4.1. Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE05)	69
4.2. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS08)	71
4.3. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS11)	72
4.4. Basis Data Terpadu	73
4.5. Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT 2015)	74
4.6. Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan	75
4.6.1. Simpanan Keluarga Sejahtera	77
4.6.2. Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)	78
4.6.3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)	81
4.6.4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	82
4.6.5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	84

BAB V. PENUTUP	89
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	97
CATATAN TEKNIS	103

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
2.1.	Beberapa Kriteria Kemiskinan dan Garis Kemiskinan	12
2.2.	Contoh Proses Pembentukan MPI	23
3.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2016	26
3.2.	Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komponennya, Maret 2015-Maret 2016 (Rp/kapita/bulan)	27
3.3.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2015-Maret 2016	28
3.4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2015-Maret 2016	29
3.5.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2016	30
3.6.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2016	32
3.7.	Gini Rasio di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2016	34
3.8.	Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2016	35
3.9.	Indeks -L di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2016	36
3.10.	Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, 2008-2016	39
3.11.	Persentase Pembagian Pengeluaran Menurut Kelas Kuantil dan Daerah, 2015-2016	40

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
3.12.	Jumlah Penduduk (000) Menurut Daerah dan Status Kemiskinan, 2015-2016	41
3.13.	Persentase Penduduk Menurut Daerah dan Status Kemiskinan, 2015-2016	42
3.14.	Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2016.....	44
3.15.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2016	46
3.16.	Karakteristik Sosial Demografi Rumah tangga Miskin dan Rumah tangga Tidak Miskin Menurut Daerah, 2016	48
3.17.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah tangga, 2016	49
3.18.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah tangga dan Daerah, 2016	50
3.19.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Pendidikan Kepala Rumah tangga dan Daerah, 2016	52
3.20.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Sumber Penghasilan Utama Rumah tangga dan Daerah, 2016	53
3.21.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah tangga dan Daerah, 2016	55
3.22.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Luas Lantai Perkapita (m ²), 2016	57

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
3.23.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas, 2016	59
3.24.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas, 2016	60
3.25.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas, 2016	61
3.26.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah, 2016	62
3.27.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah tangga, 2016.....	63
3.28.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Jenis Jamban Rumah tangga, 2016	65
3.29.	Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan <i>Head Count Index</i> Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2016	68
4.1.	Persentase Rumah tangga Penerima Beras Miskin (Raskin) Menurut Desil Pengeluaran dan Daerah, 2016	80
4.2.	Persentase Rumah tangga per Desil Pengeluaran Menurut Daerah dan Status Penerimaan Beras Miskin (Raskin), 2016	81

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Hal
2.1.	Persentase Penduduk Miskin Menurut BPS dan Bank Dunia, 2005-2011	17
2.2.	Bagan Dimensi dan Indikator Setiap Dimensi dalam MPI	21
3.1.	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 1999-2016	25
3.2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2016	31
3.3.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2016	33
3.4.	Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Perkapita/ Bulan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Status Kemiskinan, 2015-2016	42
4.1.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan, 2016	78
4.2.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) Menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan, 2016	82
4.3.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima PNPM Menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan, 2016	83
4.4.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima KUR Menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan, 2016	84

DAFTAR LAMPIRAN

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
L.1	Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Makanan, Tahun 2016 (Maret)	99
L.2	Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Bukan Makanan, Tahun 2016 (Maret)	101

<http://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Pada dasarnya berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan. Bangsa Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada era Kabinet Kerja, pemerintah masih menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian baru sejak tahun 2003, BPS dapat menyajikan data jumlah dan persentase penduduk miskin secara rutin setiap tahun.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan publikasi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin secara nasional tahun 2016 menurut daerah perkotaan dan perdesaan.
- b. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin secara nasional tahun 2016 menurut daerah perkotaan dan perdesaan.
- c. Untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan secara nasional tahun 2016 menurut daerah perkotaan dan perdesaan.
- d. Untuk mengetahui gambaran umum berbagai macam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada kondisi Maret 2016. Karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin juga disajikan pada tingkat nasional dan dipisahkan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Publikasi ini juga menyajikan distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk serta beberapa indikator kemiskinan lainnya secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

Sumber data yang digunakan dalam laporan ini adalah data Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2016 dengan jumlah sampel sekitar 300.000 rumah tangga.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang berbagai penelitian atau metodologi yang pernah dibangun dan disajikan pada publikasi sebelumnya sekaligus diperkaya dengan hasil penelitian dan pengembangan metodologi terbaru yang sudah dipublikasikan.

Bab III membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, profil rumah tangga miskin, kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

Bab IV membahas tentang pendataan program perlindungan sosial dan program bantuan sosial yang telah dilaksanakan.

Bab V menggaris-bawahi hal-hal penting yang diharapkan mampu memberikan gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator kemiskinan lainnya secara nasional menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut *kemiskinan relatif* dan *kemiskinan absolut*, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

2.1.1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk.

Dalam prakteknya, negara kaya mempunyai garis kemiskinan yang relatif lebih tinggi daripada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998:26). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Pada saat negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan kecuali Amerika Serikat, dimana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median/ rata-rata pendapatan. Ketika median/ rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu, karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2.1.2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dengan melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut "tetap (tidak berubah)" dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Di Amerika Serikat garis kemiskinan tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan ke mana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Ukuran kemiskinan yang sering digunakan Bank Dunia adalah menggunakan batas kemiskinan PPP US\$ perkapita per hari. Batas kemiskinan menggunakan PPP US\$ ini sering disalahartikan

dengan menggunakan nilai tukar biasa (*exchange rate*) untuk mendapatkan garis kemiskinan. Sehingga ada anggapan, jika misalkan nilai tukar adalah Rp. 10.000 per satu dolar, maka garis kemiskinan 1 PPP US\$ per kapita per hari menjadi Rp. 300.000 per kapita per bulan, padahal bukan seperti ini pengertian yang dimaksud. Nilai tukar yang digunakan di dalam penghitungan garis kemiskinan 1 PPP US\$ adalah nilai tukar dolar PPP (*Purchasing Power Parity*). Nilai tukar PPP menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, dalam hal ini US\$, untuk membeli barang dan jasa yang "sama" di negara lain. Contoh sederhananya adalah sebagai berikut, apabila di Indonesia seseorang membeli beras seharga Rp. 5.000 per liter, sementara di Amerika satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya adalah 1 (satu) US\$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp. 10.000, tetapi dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras tadi dianggap telah membelanjakan 1 US\$, walaupun pada kenyataannya dia hanya mengeluarkan Rp. 5.000.

Saat ini ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia adalah: a) PPP US \$ 1,25 perkapita per hari yang diperkirakan ada sekitar 1,38 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) PPP US \$ 2 perkapita per hari, yaitu sekitar 2,09 miliar penduduk yang hidup di bawah ukuran tersebut.

2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosebroto dalam "Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan" yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau dialihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan". Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini

menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, suku Tengger di pegunungan Tengger Jawa Timur, dan sebagainya.

Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut mestinya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan" yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan "Kemiskinan adalah suatu ketidak-berdayaan". Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu "sudah takdir", dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya "Gerakan Membudayakan Keberdayaan" pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu,

melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

Kemiskinan menurut *World Bank* (2000) didefinisikan sebagai, "*poverty is pronounced deprivation in well-being*" yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan. Sedangkan permasalahan inti pada kemiskinan ini adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. Di dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, disebutkan tentang istilah "fakir miskin". Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.

United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian "tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik" sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

2.2. Kriteria Kemiskinan

2.2.1. Pendekatan Kebutuhan Dasar

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli antara lain adalah:

1. Menurut *United Nations* (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986:289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
2. Menurut *United Nations Research Institute for Social Development* (UNRISD) (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986:289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986:289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 31), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.

5. Menurut Hendra Esmara (1986:320-321), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Berikut ini adalah beberapa kriteria dan garis kemiskinan yang sering dipakai sebagai rujukan dalam kajian akademis tentang kemiskinan:

Tabel 2.1
Beberapa Kriteria Kemiskinan dan Garis Kemiskinan

No. Urut	Penelitian	Kriteria	Daerah		
			Kota (K)	Desa (D)	K+D
1.	Esmara, 1969/1970 ¹⁾	Konsumsi beras per kapita per tahun (kg)	-	-	125
2.	Sayogya, 1971 ¹⁾	Tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun (kg) - Miskin (M) - Miskin Sekali (MS) - Paling Miskin (PM)	480 360 270	320 240 180	- - -
3.	Ginneken, 1969 ¹⁾	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2000 50
4.	Anne Booth, 1969/1970 ¹⁾	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari - Kalori - Protein (gram)	- -	- -	2000 40
5.	Gupta, 1973 ¹⁾	Kebutuhan gizi minimum per orang per tahun (Rp)	-	-	24000
6.	Hasan, 1975 ¹⁾	Pendapatan minimum per kapita per tahun (US \$)	125	95	-
7.	Sayogya, 1984 ²⁾	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	8240	6585	-
8.	Bank Dunia, 1984 ²⁾	Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	6719	4479	-
9.	Garis kemiskinan internasional, Interim Report, 1976 ²⁾	Pendapatan per kapita per tahun: - Nilai US \$, 1970 - US \$ Paritas daya beli	- -	- -	75 200
10.	World Bank ³⁾	Pengeluaran konsumsi yang dikonversi ke dalam US\$ PPP	-	-	1,25
11.	Rekomendasi dari FAO dan WHO di Roma tahun 2001 ⁴⁾	Batas minimal kalori sesuai kebutuhan manusia untuk mampu bertahan hidup dan mampu bekerja (kcal)	-	-	2100

Keterangan:

- 1) Hendra Esmara: *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta: 1986, hlm. 312-316, Tabel 9.2.
- 2) Kompas, Senin: 9 Mei 1988.
- 3) Haughton & Khandker. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC. Page 181.
- 4) Jausairi Hasbullah: *Tangguh Dengan Statistik*, Nuansa Cendikia, Bandung: 2012, hlm 83

Pendekatan kebutuhan dasar juga digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak pertama kali dalam menghitung angka kemiskinan. Komponen kebutuhan dasar yang digunakan BPS ini terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan yang diambil berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Mulai tahun 1998 pendekatan kebutuhan dasar yang digunakan BPS telah dilakukan penyempurnaan, di mana jumlah komponen kebutuhan dasar terdiri atas 52 jenis komoditi makanan dan 51 komoditi bukan makanan di daerah perkotaan dan 47 komoditi di daerah perdesaan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran inilah disebut sebagai Garis Kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

2.2.2. Pendekatan Non-moneter (BPS)

Pada tahun 2000 BPS pernah melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (*basic needs approach*) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga

program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Cakupan wilayah studi ini meliputi tujuh provinsi, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakkemiskinan. Kedelapan variabel tersebut adalah:

1. Luas Lantai Perkapita :
 - $\leq 8 \text{ m}^2$ (skor 1)
 - $> 8 \text{ m}^2$ (skor 0)
2. Jenis Lantai :
 - Tanah (skor 1)
 - Bukan Tanah (skor 0)
3. Air Minum/Ketersediaan Air Bersih :
 - Air hujan/sumur tidak terlindung (skor 1)
 - Ledeng/PAM/sumur terlindung (skor 0)
4. Jenis Jamban/WC :
 - Tidak Ada (skor 1)
 - Bersama/Sendiri (skor 0)
5. Kepemilikan Asset :
 - Tidak Punya Asset (skor 1)
 - Punya Asset (skor 0)
6. Pendapatan (total pendapatan per bulan) :
 - ≤ 350.000 (skor 1)
 - > 350.000 (skor 0)
7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan) :
 - 80 persen + (skor 1)
 - < 80 persen (skor 0)
8. Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam) :
 - Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1)
 - Ada, bervariasi (skor 0)

Kedelapan variabel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *stepwise logistic regression* dan misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji *Chi-Square* juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Dengan demikian apabila suatu rumah tangga mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

2.2.3. Pendekatan Keluarga Sejahtera (BKKBN)

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 pernah menerapkan konsep dan definisi kemiskinan dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap. Pendataan keluarga tersebut menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus).

Menurut BKKBN kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian.
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Selanjutnya mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas. Pendekatan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, di samping ke 5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

2.2.4. Pendekatan US\$ (Bank Dunia)

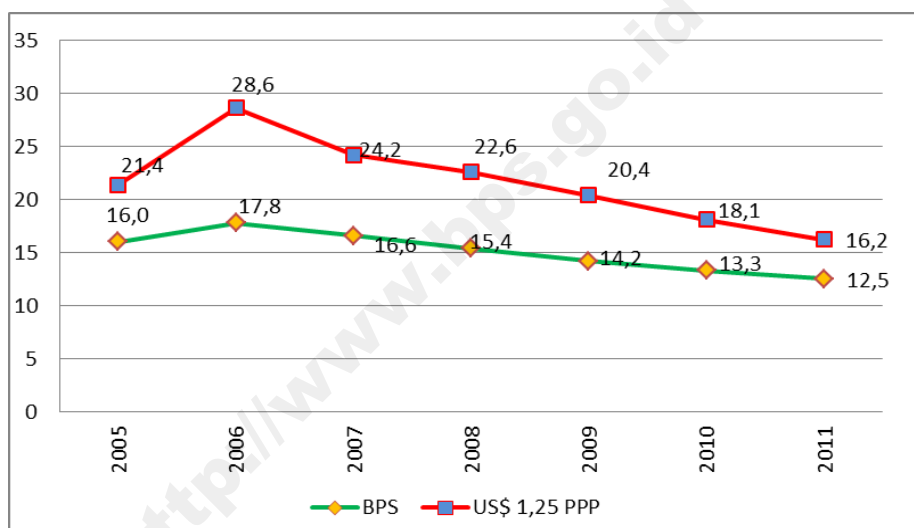
Untuk membandingkan kemiskinan antarnegara, Bank Dunia menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan ke dollar Amerika dengan menggunakan paritas (kesetaraan) daya beli (*purhasing power parity*, PPP) per hari, bukan dengan nilai tukar US\$ resmi. Angka konversi PPP adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dimana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli sebesar US\$ 1 di Amerika Serikat.

Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari. Artinya, penduduk yang dianggap miskin di semua negara di dunia ini adalah penduduk yang memiliki pengeluaran kurang dari PPP US\$ 1,25 per hari. Penentuan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari didasarkan pada garis kemiskinan 75 negara (*less-developed countries dan developing countries*) yang dikumpulkan oleh Bank Dunia sepanjang tahun 1990—2005. Sebagian besar garis kemiskinan tersebut ditentukan dengan menggunakan metode penghitungan yang sama, yakni metode biaya pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Untuk menghitung garis kemiskinan internasional, Bank Dunia mengkonversi garis kemiskinan 75 negara tersebut yang dinyatakan dalam mata uang masing-masing negara ke dollar AS. Selanjutnya, dengan menggunakan teknik statistik tertentu, para peneliti Bank Dunia menemukan bahwa rata-rata garis kemiskinan untuk 15 negara termiskin (*less-developed countries*) adalah sebesar 38 dollar AS per kapita per bulan atau sekitar 1,25 dollar AS per kapita per hari. Berdasarkan temuan ini, Bank Dunia kemudian menetapkan bahwa garis kemiskinan internasional sebesar 1,25

dollar AS per kapita per hari. Garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari merupakan revisi atau penyempurnaan terhadap garis kemiskinan internasional yang digunakan Bank Dunia sebelumnya, yakni sebesar 1 dollar AS per kapita per hari.

Perbandingan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2011 (data terakhir Bank Dunia adalah tahun 2011) menurut BPS dan Bank Dunia adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Persentase Penduduk Miskin Indonesia Menurut BPS dan Bank Dunia, 2005-2011



2.3. Pemetaan Penduduk Miskin

Pemetaan penduduk miskin memberikan gambaran awal yang menyeluruh (*snapshot*) mengenai sebaran penduduk miskin berdasarkan tingkat wilayah administrasi tertentu dan pada waktu tertentu. Peta semacam ini adalah untuk mengetahui peta wilayah atau “kantong” penduduk miskin di Indonesia. Melalui peta ini penduduk miskin dapat

diketahui, baik secara relatif (persentase penduduk miskin) maupun secara absolut (jumlah penduduk miskin).

Metode pemetaan penduduk miskin (Metode *PovMap*) pada dasarnya merupakan suatu metode yang menggunakan model regresi untuk memperkirakan pengeluaran rumah tangga dalam sensus berdasarkan data pengeluaran hasil survei. Hasil estimasi mengenai ukuran-ukuran kesejahteraan rumah tangga hasil sensus kemudian diaggregasikan menjadi ukuran-ukuran kemiskinan dan ketimpangan pada tingkat desa.

Metode *PovMap* diimplementasikan melalui dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap pembentukan model pengeluaran dan dekomposisi komponen *residu* (random). Dalam tahap ini penghitungan *poverty mapping* dimulai dengan melakukan estimasi fungsi pengeluaran. Dalam pemilihannya, variabel-variabel penjelas yang akan digunakan dalam model pengeluaran harus terdapat pada data sensus dan survei, variabel-variabel tersebut kemudian diuji dan didiagnostik melalui metode statistik untuk memperoleh variabel penjelas yang paling tepat menjelaskan fungsi konsumsi rumah tangga. Tahap kedua adalah tahap simulasi. Pada tahap ini proses simulasi melakukan beberapa tahap iterasi untuk memperoleh model yang paling tepat untuk menjelaskan konsumsi rumah tangga sensus. Proses ini menggunakan paket program (*software package*) yang telah disiapkan oleh Qinghua Zhao dari DECRG *World Bank* (2002). Aplikasi *software* tersebut secara otomatis (dengan spesifikasi model yang memadai) menghasilkan indeks-indeks kemiskinan sampai pada level desa dengan masing-masing tingkat kecermatan kesalahan bakunya.

2.4. Kemiskinan Multidimensi (*Multidimensional Poverty Index*)

Perkembangan studi tentang kemiskinan mengalami pergeseran yang cukup signifikan dalam analisis *Human Development Report* (HDR) yang diajukan oleh *United National Development Program* (UNDP) dan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI). Sejak tahun 2010, UNDP dan OPHI menyetujui sebuah pengukuran kemiskinan baru melalui *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang dimuat dalam HDR 2010.

Berbeda dengan metode pengukuran kemiskinan yang selama ini berbasis pengeluaran atau konsumsi. MPI melihat struktur kemiskinan secara lebih luas bukan sekedar pengeluaran atau konsumsi tapi mendefinisikan secara multidimensi seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. Konsep ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Amartya Sen, yang menyebutkan bahwa kemiskinan itu harus dilihat dari berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi dan kebebasan masyarakat terhadap akses ekonomi (Sen, 1981; Sen, 2000).

MPI pertama kali dikembangkan oleh OPHI dengan UNDP pada tahun 2010. Dimana tujuan dari MPI adalah untuk memotret kondisi kemiskinan secara lebih holistic. Selama ini, indicator secara global yang banyak digunakan dalam menghitung angka kemiskinan adalah melalui pendekatan moneter seperti garis kemiskinan dengan batas USD. 1,25 Purchasing Power Parity (PPP), USD. 1,5 PPP atau melalui pendekatan konsumsi dasar (*basic need*) yang digunakan di Indonesia.

2.4.1. Pengukuran MPI

MPI meliputi tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kualitas kehidupan. Ada sepuluh indikator yang lebih komprehensif dalam mengukur kemiskinan dimana indikator yang ditetapkan dalam MPI merupakan cakupan dari tujuan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs).

a. Dimensi Kesehatan

Untuk dimensi kesehatan, MPI mengukur dengan menggunakan dua indikator yaitu gizi dan kematian anak. Pada konsepnya, dua indikator ini dalam kesehatan merupakan bagian dari kesehatan dasar yang mutlak diakses oleh rumah tangga. Indikator gizi, MPI mengukur pada setiap anggota rumah tangga baik itu anak atau orang dewasa. Untuk anak, pengukuran gizi mengacu pada standard MDGs yaitu melalui pendekatan berat badan berbanding usia anak. Anak dikatakan memiliki gizi kurang ketika berat badan berada pada dua atau lebih di bawah standard deviasi

rata-rata populasi yang menjadi acuan. Sedangkan untuk orang dewasa, menggunakan pendekatan *Body Mass Index* (BMI). Dimana seorang dewasa dianggap kurang gizi ketika BMI lebih rendah dari 18,5.

Indikator lain dari dimensi kesehatan adalah kematian anak. Secara filosofi kesehatan, adanya anak yang meninggal merupakan cerminan dari ketidakmampuan terhadap kesehatan. Bisa saja kematian tersebut akibat penyakit atau kekurangan gizi. Penilaian mencakup semua umur anak. Ketika ada rumah tangga yang memiliki kematian anak baik satu, dua atau seterusnya maka rumah tangga tersebut masuk dalam satu poin penilaian dalam MPI.

b. Dimensi Pendidikan

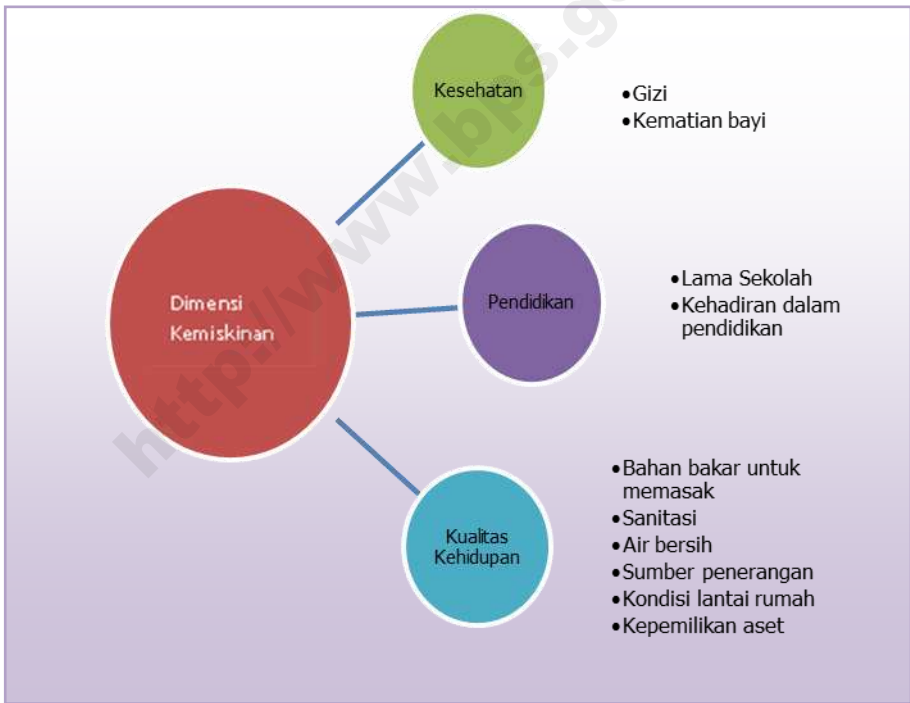
Ada dua indikator dalam mengukur dimensi pendidikan yaitu lama sekolah (*years of schooling*) dan akses terhadap pendidikan (*attendance of school*). Dua indikator ini lebih mencerminkan kepada kemampuan masyarakat terhadap akses dasar kesehatan dan bukan mencerminkan kualitas dari pendidikan yang mereka dapati. Lama pendidikan dalam MPI dihitung minimal ada satu orang dalam rumah tangga yang telah menyelesaikan pendidikan minimal lima tahun. Sedangkan kehadiran anak di sekolah dihitung keberadaan anak usia sekolah yaitu kelas satu sampai delapan yang akses (hadir) dalam pendidikan.

c. Dimensi Standar Hidup

Standar hidup dapat mencerminkan pola kehidupan keseharian dari masyarakat. Kemiskinan akan menjadikan masyarakat tidak dapat memenuhi kualitas standard dari kehidupan sesuai dengan MDGs. Indikatornya terdiri dari enam indikator. Pertama adalah air, di mana seseorang memiliki akses terhadap air minum bersih jika sumber air salah satu jenis berikut: pipa air, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, dilindungi semi atau air hujan, dan itu dalam jarak 30 menit berjalan kaki (pulang pergi). Jika gagal untuk memenuhi kondisi tersebut, maka rumah tangga dianggap kekurangan dalam akses terhadap air. Kedua, sanitasi. Seseorang dianggap memiliki akses ke sanitasi, jika rumah tangga memiliki beberapa jenis toilet atau jamban, atau berventilasi baik. Jika

rumah tangga tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dianggap kekurangan dalam sanitasi. Ketiga, listrik yaitu seseorang dianggap miskin jika tidak memiliki akses listrik. Keempat lantai rumah dimana jika bahan lantai terbuat dari tanah, pasir atau kotoran dianggap miskin. Kelima, bahan bakar untuk memasak yaitu seseorang dianggap miskin bila dalam bahan bakar memasak, rumah tangga tersebut menggunakan arang atau kayu. Keenam, kepemilikan aset apabila rumah tangga tidak memiliki lebih dari satu radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor atau kulkas, dan tidak memiliki mobil maka dianggap miskin. Secara umum indikator MPI dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Bagan Dimensi dan Indikator Setiap Dimensi dalam MPI



MPI dihitung menggunakan bobot tertimbang dari dimensi dan indikator. Bobot dari dimensi ditimbang sama yaitu 1/3 untuk masing-masing dimensi

dan setiap indikator dalam dimensi juga ditimbang sama. Sehingga didapatkan bobot indikator sebagai berikut: bobot indikator kesehatan yang terdiri dari dua indikator dinilai sebesar 1/6, bobot pendidikan yang terdiri dari dua indikator dinilai 1/6 dan bobot kualitas hidup yang terdiri dari enam indikator dinilai 1/18.

Setiap orang yang dinilai dalam MPI dilihat dari indikator yang dinilai. Penilaiannya terdiri dari rentang 0-1. Ketika seseorang memenuhi penilaian kemiskinan menurut indikator MPI maka diberikan poin 1. Penilaian akan terus dilakukan pada setiap indikator. Setelah mendapatkan penilaian terhadap sepuluh indikator maka akan dihitung berdasarkan rumus seperti berikut:

$$c_i = w_1I_1 + w_2I_2 + \dots + w_dI_d$$

Dimana $I_i = 1$ jika seseorang kena dalam indikator i dan $I_i = 0$ jika bukan. W_i adalah bobot dari indikator dengan total bobotnya bernilai 1. Semua indikator dan dimensi dijumlahkan kemudian dicari nilai rata-ratanya. MPI adalah perkalian dari *multidimensional head count ratio* (H) dengan *intensity of poverty* (A).

$$H = \frac{q}{n}$$

Dimana q adalah jumlah individu yang dikategorikan miskin secara multidimensional sedangkan n adalah total populasi.

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n c_i(k)}{q}$$

Dimana $C_i(k)$ adalah skor individu dan q adalah jumlah individu yang mengalami kemiskinan multidimensional. Sehingga $MPI = H \times A$

Secara sederhana proses pembentukan MPI sebagai berikut: (Misalkan data sampel/survei sebanyak 4 rumah tangga)

Tabel 2.2
Contoh Proses Pembentukan MPI

Indikator	ART dalam Ruta Sampel				Bobot
	1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah ART dalam rumah tangga sampel	4	7	5	4	
Kesehatan					
• Kematian anak jika ada anak yang meninggal	0	1	0	1	1/6=0,167
• Imunisasi jika tidak melakukan imunisasi	0	1	0	0	1/6=0,167
Pendidikan					
• Lama sekolah jika kurang dari enam tahun	0	0	1	0	1/9=0,111
• Kehadiran dalam pendidikan jika anak usia sekolah tidak bersekolah	1	1	0	1	1/9=0,111
• Kemampuan membaca jika tidak bisa membaca dan menulis	0	1	1	1	1/9=0,111
Standar Hidup					
• Bahan bakar memasak jika memakai kayu/arang	0	0	1	0	1/15=0,067
• Sanitasi jika tidak memadai	0	1	1	0	1/15=0,067
• Air bersih jika tidak ada akses terhadap air bersih	0	0	0	0	1/15=0,067
• Sumber penerangan jika tidak menggunakan listrik	1	1	1	1	1/15=0,067
• Lantai rumah jika terbuat dari tanah/kayu	0	1	0	1	1/15=0,067
Skor (C_i)	0,178	0,697	0,423	0,523	
Apakah masuk dalam kategori miskin MPI (C_i ≥ 1/3 = 0,333)	Tidak	Ya	Ya	Ya	
Sensor Skor (C_i)	0	0,697	0,423	0,523	

Skor setiap anggota rumah tangga dalam ruta contoh ruta 1: $C_1 = (1 \times 1/9) + (1 \times 1/15) = 0,178$

Multidimensional head count ratio (H) = $q/n = (7+5+4)/(4+7+5+4) = 0,800$

Intensity of poverty (A) = $[(0,697 \times 7) + (0,423 \times 5) + (0,523 \times 4)]/7+5+4 = 0,5679$

Sehingga MPI = $H \times A = 0,800 \times 0,5679 = 0,4543$

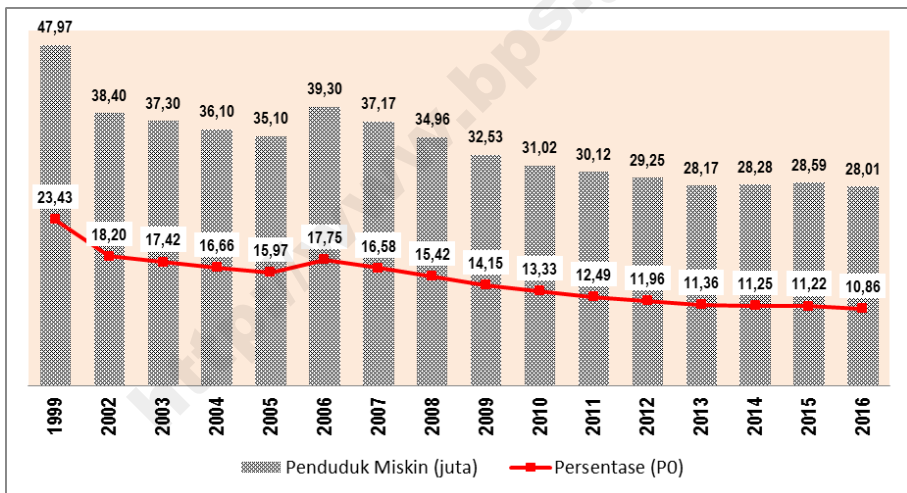
Interpertasinya secara singkat adalah 80 persen penduduk merupakan penduduk miskin secara multidimensi, sedangkan secara indikator penduduk miskin mengalami sekitar 56,79 persen kemiskinan/deprivasi, sehingga kemiskinan multidimensi sebesar 45 persen.

BAB III KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA

3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1999-2016

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 1999-2016 ditunjukkan pada Gambar 3.1 dan Tabel 3.1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Gambar 3.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 1999-2016



Pada periode 1999-2005 terlihat adanya tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 1999-2005 adalah sebesar 12,87 juta jiwa, yaitu 47,97 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi 35,10 juta jiwa tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.

Kemudian pada tahun 2006 terjadi kenaikan baik secara absolut maupun relatif yaitu masing-masing menjadi 39,30 juta jiwa dan 17,75 persen. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diindikasikan menjadi salah satu faktor penyebab naiknya angka kemiskinan pada tahun 2006 tersebut.

Tabel 3.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah, 1999-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	(juta)					
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1999 ¹⁾	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2002 ¹⁾	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003 ²⁾	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004 ²⁾	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005 ²⁾	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006 ³⁾	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007 ³⁾	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008 ³⁾	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009 ³⁾	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010 ³⁾	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011 ⁴⁾	11,08	19,04	30,12	9,23	15,72	12,49
2012 ⁴⁾	10,71	18,54	29,25	8,79	15,10	11,96
2013 ⁴⁾	10,39	17,78	28,17	8,42	14,28	11,36
2014 ⁴⁾	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25
2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22
2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86

Catatan :

- ¹⁾ Dihitung berdasarkan data Susenas Modul Konsumsi 1999, dan 2002.
- ²⁾ Dihitung berdasarkan data Susenas Panel Modul Konsumsi Feb 2003, 2004 dan 2005
- ³⁾ Dihitung berdasarkan data Susenas Panel Modul Konsumsi Maret 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010
- ⁴⁾ Dihitung berdasarkan data Susenas Modul Konsumsi Maret 2011, 2012, 2013, 2014 dengan penimbang proyeksi penduduk

Dalam satu dekade, yaitu periode tahun 2006-2016 tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Pada periode ini jumlah penduduk miskin turun sebanyak 11,29 juta jiwa, yaitu dari 39,3 juta jiwa pada tahun 2006 menjadi 28,01 juta jiwa pada Maret 2016. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,75 persen pada tahun 2006 menjadi 10,86 persen pada Maret 2016.

3.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2015–Maret 2016

Perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir dapat dilihat melalui Analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi bulan Maret 2015 dan Maret 2016. Analisis ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

3.2.1 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan pada periode Maret 2015-Maret 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.610,- perkapita per bulan atau sebesar 7,14 persen, yaitu dari Rp. 330.776,- pada Maret 2015 menjadi Rp. 354.386,- pada Maret 2016 (Tabel 3.2). Keadaan yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu masing-masing meningkat sebesar 6,42 persen (naik dari Rp. 342.541,- menjadi Rp.364.527,-) dan 8,11 persen (naik dari Rp. 317.881,- menjadi Rp.343.646,-).

Tabel 3.2
Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komponennya,
Maret 2015 – Maret 2016
(Rp/Kapita/Bulan)

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan		
	Makanan (GKM)	Non-Makanan (GKNM)	Total (GK)
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2015	238 278	104 263	342 541
Maret 2016	255 181	109 346	364 527
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2015	245 357	72 524	317 881
Maret 2016	266 132	77 514	343 646
<u>Perkotaan + Perdesaan</u>			
Maret 2015	242 241	88 535	330 776
Maret 2016	260 469	93 917	354 386

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2015 dan Maret 2016

3.2.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2016 sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen), angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,58 juta jiwa dari keadaan Maret 2015 dengan jumlah penduduk miskin 28,59 juta orang (11,22 persen), sehingga secara absolut maupun persentase, angka kemiskinan mengalami penurunan. Selama periode Maret 2015-Maret 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,31 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,27 juta orang (Tabel 3.3).

Tabel 3.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2015 – Maret 2016

Daerah/Tahun	Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin	Perubahan jumlah penduduk miskin (juta)	Perubahan persentase penduduk miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
Maret 2015	10,65	8,29		
Maret 2016	10,34	7,79	-0,31	-0,50
<u>Perdesaan</u>				
Maret 2015	17,94	14,21		
Maret 2016	17,67	14,11	-0,27	-0,10
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>				
Maret 2015	28,59	11,22		
Maret 2016	28,01	10,86	-0,58	-0,36

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2015 dan Maret 2016

3.2.3 Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin saja, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada periode Maret 2015-Maret 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 1,97 pada keadaan Maret 2015 menjadi 1,94 pada keadaan Maret 2016. Demikian pula pada periode yang sama dengan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,54 menjadi 0,52 (Tabel 3.4).

Tabel 3.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia
Menurut Daerah, Maret 2015 – Maret 2016

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</i>			
Maret 2015	1,40	2,55	1,97
Maret 2016	1,19	2,74	1,94
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)</i>			
Maret 2015	0,36	0,71	0,54
Maret 2016	0,27	0,79	0,52

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2015 dan Maret 2016

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) tahun 2016 di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di daerah perdesaan relatif lebih lebar dari pada di daerah perkotaan. Kondisi serupa terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2), yang mana nilai P_2 di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Dari nilai P_2 ini dapat dikatakan bahwa ketimpangan rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada di daerah perkotaan.

3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia, Tahun 1999-2016

Secara umum nilai indeks kedalaman kemiskinan pada periode 1999-2016 berfluktuasi. Dari Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa indeks kedalaman

kemiskinan cenderung menurun dari 4,33 pada tahun 1999 menjadi 1,94 pada tahun 2016. Akan tetapi perlu dicatat bahwa pada periode 2005-2006 terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari 2,78 menjadi 3,43. Kemudian pada periode selanjutnya kembali terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 3,43 pada tahun 2006 dan terus menurun menjadi 1,75 pada tahun 2014. Tercatat pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan kembali mengalami peningkatan, yaitu dari 1,75 pada tahun 2014 menjadi 1,97 pada tahun 2015 dan sedikit menurun pada tahun 2016 menjadi 1,94.

Tabel 3.5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)
di Indonesia Menurut Daerah, 1999-2016

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1999	3,52	4,84	4,33
2002	2,59	3,34	3,01
2003	2,55	3,53	3,13
2004	2,18	3,43	2,89
2005	2,05	3,34	2,78
2006	2,61	4,22	3,43
2007	2,15	3,78	2,99
2008	2,07	3,42	2,77
2009	1,91	3,05	2,50
2010	1,57	2,80	2,21
2011	1,52	2,63	2,08
2012	1,40	2,35	1,88
2013	1,26	2,23	1,74
2014	1,25	2,26	1,75
2015	1,40	2,55	1,97
2016	1,19	2,74	1,94

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas.

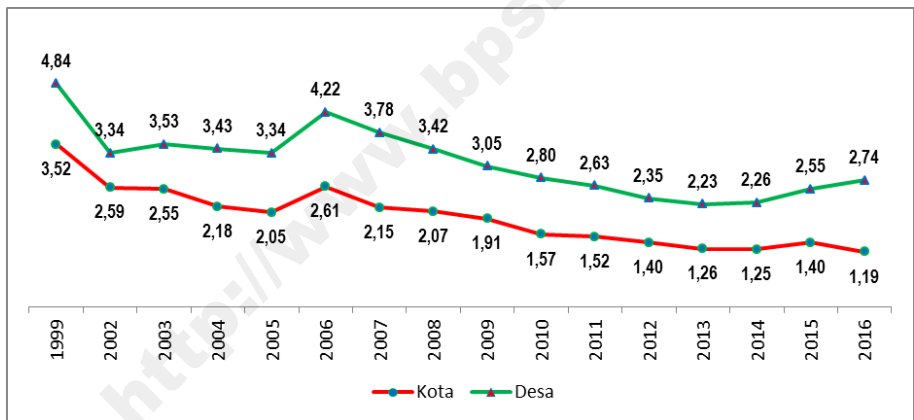
- Tahun 1999 dan 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler.
- Tahun 2003, 2004, dan 2005 Susenas Panel (Februari).
- Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 Susenas Panel (Maret).
- Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 Susenas Modul Konsumsi Maret.

Ditinjau menurut daerah, pada periode yang sama tampak bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan juga menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan menurun dari 3,52 pada tahun 1999 menjadi 1,19 pada tahun

2016, demikian pula di perdesaan menurun dari 4,84 pada tahun 1999 menjadi 2,74 pada tahun 2016.

Selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2016 tercatat tiga periode Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada periode 2005-2006, 2014-2015 dan pada periode tahun 2015-2016. Pada periode 2005-2006 Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan dari 2,78 pada tahun 2005 menjadi 3,43 pada tahun 2006, periode tahun 2014-2015 mengalami kenaikan dari 1,75 pada tahun 2014 menjadi 1,97 pada tahun 2015. Sementara itu, pada periode 2015-2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan ini mengalami kenaikan dari 2,55 pada tahun 2015 menjadi 2,74 pada tahun 2016.

Gambar 3.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Indonesia
Menurut Daerah, 1999-2016



Indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di perkotaan. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di daerah perdesaan Indonesia relatif lebih jauh bila dibandingkan dengan daerah di perkotaan Indonesia (Gambar 3.2).

3.4. Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia, Tahun 1999-2016

Secara umum indeks keparahan kemiskinan cenderung menurun dari 1,23 pada tahun 1999 menjadi 0,76 pada tahun 2005. Tetapi pada periode 2005-2006 terjadi kenaikan dari 0,76 menjadi 1,00. Untuk selanjutnya, pada periode tahun 2006-2016 nilai indeks keparahan kemiskinan kembali mengalami penurunan yaitu dari 1,00 pada tahun 2006 menjadi 0,52 pada tahun 2016.

Tabel 3.6
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
Indonesia Menurut Daerah, 1999-2016

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1999	0,98	1,39	1,23
2002	0,71	0,85	0,79
2003	0,74	0,93	0,85
2004	0,58	0,90	0,78
2005	0,60	0,89	0,76
2006	0,77	1,22	1,00
2007	0,57	1,09	0,84
2008	0,56	0,95	0,76
2009	0,52	0,82	0,68
2010	0,40	0,75	0,58
2011	0,39	0,70	0,54
2012	0,36	0,59	0,47
2013	0,31	0,55	0,43
2014	0,31	0,57	0,44
2015	0,36	0,71	0,54
2016	0,27	0,79	0,52

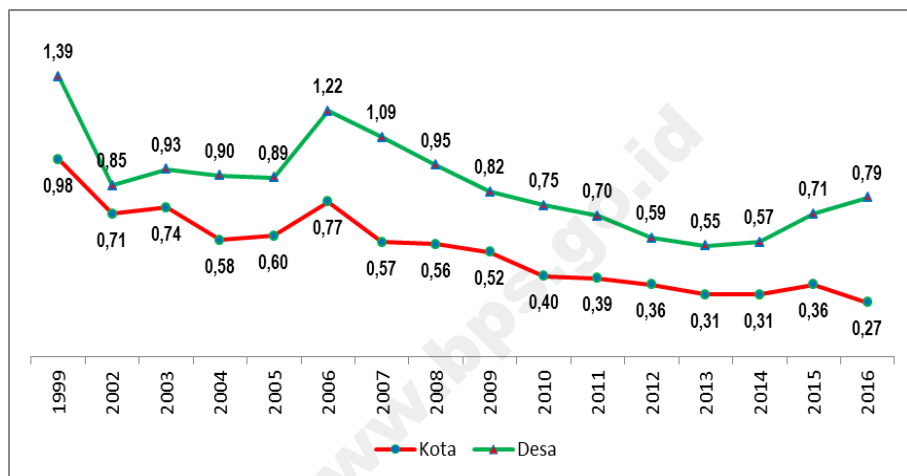
Sumber : BPS, diolah dari data Susenas.

- Tahun 1999 dan 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler.
- Tahun 2003, 2004, dan 2005 Susenas Panel (Februari).
- Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 Susenas Panel (Maret).
- Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 Susenas Modul Konsumsi Maret.

Ditinjau menurut daerah, pada periode yang sama tampak bahwa indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan menurun dari 0,98 pada tahun 1999 menjadi 0,27 pada tahun 2016. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan di daerah

perdesaan menurun dari 1,39 pada tahun 1999 menjadi 0,79 pada tahun 2016. Pada periode satu tahun terakhir yaitu periode 2015-2016, Indeks keparahan kemiskinan di desa mengalami peningkatan sedangkan di perkotaan mengalami penurunan.

Gambar 3.3
Indeks Keparahkan Kemiskinan (P_2) di Indonesia
Menurut Daerah, 1999-2016



Nilai Indeks keparahan kemiskinan apabila dibandingkan menurut daerah, maka daerah perdesaan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesaan Indonesia memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dari pada ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan Indonesia (Gambar 3.3).

3.5. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran di Indonesia, Tahun 2002-2016

Secara umum angka Gini Rasio pada periode 2002-2016 di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada periode 2002-2007 terjadi kenaikan gini rasio dari 0,330 pada tahun 2002 menjadi 0,376 pada tahun

2007. Angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik semakin buruk. Peningkatan angka gini rasio pada periode 2002-2007 mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin memburuk (Tabel 3.7).

Pada tahun 2008 angka gini rasio menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 0,376 pada tahun 2007 menjadi 0,371. Pada periode 2008-2009 terjadi perubahan angka gini rasio dari 0.371 menjadi 0.357. Selanjutnya pada tahun 2010 terjadi peningkatan angka gini rasio dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,378. Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2011, angka gini rasio meningkat menjadi 0,410 dan selanjutnya mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 perubahan angka gini rasio cenderung turun meski perlahan. Jika diperhatikan angka gini rasio menurut daerah, dari tahun 2002 hingga tahun 2016 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.

Tabel 3.7
Gini Rasio di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2016

Tahun	Gini Rasio		
	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2002	0,330	0,290	0,329
2005	0,338	0,264	0,343
2006	0,350	0,276	0,357
2007	0,374	0,302	0,376
2008	0,369	0,304	0,371
2009	0,362	0,288	0,357
2010	0,382	0,315	0,378
2011	0,422	0,340	0,410
2012	0,425	0,330	0,410
2013	0,431	0,320	0,413
2014	0,428	0,319	0,406
2015	0,428	0,334	0,408
2016	0,410	0,327	0,397

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi

- Tahun 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler.

- Tahun 2005 Susenas Panel (Februari).

- Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 Susenas Panel (Maret).

- Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 Susenas Modul Konsumsi Maret.

Selain Gini Rasio dikenal juga Indeks Theil yang dapat menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Berbeda dengan Gini Rasio, Indeks Theil ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok atas (penduduk kaya). Secara umum angka Indeks Theil pada periode 2002-2016 di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi. Angka Indeks Theil ada kecenderungan mengalami peningkatan pada periode 2002-2006, yaitu dari 0,1487 menjadi 0,2868. Namun pada periode 2006-2010 tercatat mengalami penurunan yaitu dari 0,2868 pada tahun 2006 menjadi 0,1828 pada tahun 2010. Selanjutnya pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 nilai Indeks Theil menurun yaitu dari 0,3443 pada tahun 2011 menjadi 0,2935 pada tahun 2016. Secara rinci nilai indeks Theil di Indonesia pada periode 2002-2016 menurut daerah disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Indeks Theil di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2016

Tahun	Indeks Theil		
	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2002	0,1891	0,1164	0,1487
2005	0,2177	0,1231	0,1667
2006	0,2984	0,1393	0,2868
2007	0,2590	0,1670	0,2674
2008	0,2529	0,1756	0,2614
2009	0,2251	0,1398	0,2207
2010	0,2082	0,1461	0,1828
2011	0,3620	0,2221	0,3443
2012	0,3168	0,2119	0,3446
2013	0,3530	0,1967	0,3371
2014	0,3493	0,1926	0,3263
2015	0,3561	0,2189	0,3334
2016	0,3049	0,1928	0,2935

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi

- Tahun 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler.
- Tahun 2005 Susenas Panel (Februari).
- Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 Susenas Panel (Maret).
- Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 Susenas Modul Konsumsi Maret.

Indikator ketimpangan pengeluaran yang lainnya adalah Indeks-L. Angka Indeks-L ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok bawah. Secara umum angka Indeks-

L pada periode 2002-2016 di Indonesia juga cenderung mengalami fluktuasi. Angka Indeks-L memiliki kecenderungan meningkat pada periode 2002-2007 dan kembali turun pada periode 2008-2010. Selanjutnya pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan angka indeks-L dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada periode tahun 2012-2016 angka indeks Theil mengalami penurunan dari 0,2747 menjadi 0,2579.

Nilai indeks-L di Indonesia pada periode 1999-2016 menurut daerah disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Indeks-L di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2016

Tahun	Indeks-L		
	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2002	0,1616	0,1017	0,1283
2005	0,1870	0,1119	0,1465
2006	0,2044	0,1238	0,2102
2007	0,2281	0,1480	0,2296
2008	0,2203	0,1466	0,2208
2009	0,2131	0,1325	0,2061
2010	0,2000	0,1403	0,1753
2011	0,2938	0,1881	0,2759
2012	0,2967	0,1761	0,2747
2013	0,3049	0,1664	0,2769
2014	0,3000	0,1652	0,2682
2015	0,3016	0,1832	0,2724
2016	0,2786	0,1736	0,2579

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi

- Tahun 2002 Susenas Modul Konsumsi reguler.
- Tahun 2005 Susenas Panel (Februari).
- Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 Susenas Panel (Maret).
- Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 Susenas Modul Konsumsi Maret.

Pada periode 2002-2005 tampak bahwa secara umum Gini Rasio mengalami peningkatan dari 0,329 menjadi 0,343. Pola yang berbeda terjadi bila ditinjau menurut daerah dimana angka Gini Rasio meningkat dari 0,330 menjadi 0,338 di perkotaan sedangkan di perdesaan menurun dari 0,290 menjadi 0,264. Sementara itu Indeks Theil juga meningkat dari 0,1891 menjadi 0,2177 di perkotaan dan dari 0,1164 menjadi 0,1231 di perdesaan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Indeks-L pada periode yang sama, yaitu meningkat dari 0,1616 menjadi 0,1870 di perkotaan dan dari 0,1017

menjadi 0,1119 di perdesaan. Peningkatan distribusi pengeluaran penduduk secara umum lebih diakibatkan oleh distribusi pengeluaran penduduk kaya di perkotaan yang semakin melebar dibandingkan dengan di perdesaan. Sejalan dengan itu tampak bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin juga sedikit melebar. Peningkatan angka Gini Rasio, Indeks Theil dan Indeks-L ini mengindikasikan adanya ketimpangan pengeluaran penduduk yang semakin besar pada periode 2002-2005.

Angka Gini Rasio secara umum pada periode 2005-2006 kembali meningkat dari 0,343 menjadi 0,357 dimana di perkotaan dari 0,338 menjadi 0,350 dan di perdesaan dari 0,264 menjadi 0,276. Angka indeks Theil juga kembali meningkat dari 0,2177 menjadi 0,2984 di perkotaan dan dari 0,1231 menjadi 0,1393 di perdesaan. Demikian pula angka Indeks-L meningkat dari 0,1870 menjadi 0,2044 di perkotaan dan dari 0,1119 menjadi 0,1238 di perdesaan pada periode tersebut. Peningkatan distribusi pengeluaran penduduk secara umum lebih diakibatkan oleh distribusi pengeluaran penduduk kaya di perkotaan yang semakin melebar dibandingkan dengan di perdesaan. Sejalan dengan itu tampak juga bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin juga sedikit melebar. Ketiga indeks tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005.

Dibandingkan periode sebelumnya tampak bahwa secara umum distribusi pengeluaran penduduk berdasarkan Angka Gini Rasio pada periode 2006-2007 semakin memburuk. Indikasi ini ditunjukkan oleh Angka Gini Rasio yang meningkat dari 0,350 menjadi 0,374 di perkotaan dan dari 0,276 menjadi 0,302 di perdesaan. Angka indeks Theil menurun dari 0,2984 menjadi 0,2590 di perkotaan tetapi di perdesaan terjadi peningkatan dari 0,1393 menjadi 0,1670. Sedangkan indeks-L meningkat dari 0,2044 menjadi 0,2281 di perkotaan, demikian pula di perdesaan meningkat dari 0,1238 menjadi 0,1480. Tampak bahwa semakin buruknya distribusi pengeluaran penduduk secara umum lebih diakibatkan oleh distribusi pengeluaran penduduk kaya di perdesaan yang semakin melebar meskipun distribusi pengeluaran penduduk kaya di perkotaan semakin membaik. Hal ini didukung pula oleh distribusi pengeluaran penduduk miskin yang semakin melebar baik di perkotaan maupun di perdesaan. Jadi, distribusi

pengeluaran penduduk semakin tidak merata pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006 yang tampak dari indikasi ketiga indeks tersebut.

Pada periode 2011-2016 tampak bahwa Gini Rasio mengalami penurunan dari 0,410 menjadi 0,397. Pola serupa juga terjadi apabila ditinjau menurut daerah dimana angka Gini Rasio menurun dari 0,422 menjadi 0,410 di perkotaan sedangkan di perdesaan menurun dari 0,340 menjadi 0,327. Sementara itu Indeks Theil turun dari 0,3620 menjadi 0,3049 di daerah perkotaan dan untuk daerah perdesaan mengalami penurunan dari 0,2221 menjadi 0,1928. Hal serupa ditunjukkan oleh Indeks-L pada periode yang sama, yaitu sedikit menurun dari 0,2938 menjadi 0,2786 di daerah perkotaan dan untuk daerah perdesaan turun dari 0,1881 menjadi 0,1736 di perdesaan. Penurunan Gini Rasio, Indeks Theil, maupun Indeks-L pada periode 2011-2016 menunjukkan bahwa terjadi perbaikan distribusi pengeluaran penduduk baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Tabel 3.10

Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, 2008-2016

Daerah/ Kelompok Penduduk	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kota (%) :									
40 % Terendah	18,55	18,50	17,57	16,10	16,00	15,40	15,62	15,83	15,91
40 % Menengah	37,00	36,58	36,99	34,77	34,53	34,83	34,88	34,60	36,74
20 % Teratas	44,45	44,92	45,44	49,13	49,48	49,77	49,50	49,57	47,35
Desa (%) :									
40 % Terendah	22,06	22,45	20,98	19,97	20,60	21,03	20,94	20,42	20,40
40 % Menengah	38,58	38,45	38,78	37,47	37,57	37,96	38,40	37,53	38,50
20 % Teratas	39,36	39,11	40,24	42,55	41,82	41,00	40,65	42,05	41,10
Kota+Desa (%) :									
40 % Terendah	18,72	18,96	18,05	16,86	16,98	16,87	17,12	17,10	17,02
40 % Menengah	36,43	36,14	36,48	34,73	34,41	34,09	34,60	34,65	36,09
20 % Teratas	44,86	44,90	45,47	48,41	48,61	49,04	48,28	48,25	46,89

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi

- Tahun 2008, 2009, dan 2010 diolah dari Susenas Panel (Maret).
- Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 diolah dari Susenas Modul Konsumsi Maret.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari kelompok pengeluaran ini terhadap seluruh pengeluaran penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran sebagai berikut:

- a. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*highly inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen,
- b. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen,
- c. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah di atas 17 persen.

Secara umum pada periode tahun 2008 sampai tahun 2010 tingkat ketimpangan pengeluaran cenderung rendah (*low inequality*), karena porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah tercatat sebesar 18,72 persen pada tahun 2008 dan selanjutnya menjadi sebesar 18,05 pada tahun 2010. Baru selanjutnya pada tahun 2011-2013 terjadi pergeseran tingkat ketimpangan pengeluaran menjadi ketimpangan dengan tingkat sedang (*moderate inequality*) karena selama periode tersebut porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah berada pada angka sekitar 16 persen dan kemudian pada tahun 2015-2016 ketimpangan pengeluaran cenderung bergeser menjadi ketimpangan pengeluaran cenderung rendah (*low inequality*) karena porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah berada pada angka sekitar 17 persen.

Pada daerah perkotaan, pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terlihat ketimpangan masih cenderung rendah karena porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah berada masih selalu di atas angka 17 persen, tetapi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tingkat ketimpangan pengeluaran di daerah perkotaan cenderung memburuk yaitu bergeser ke arah ketimpangan sedang (*moderate*). Hal ini menunjukkan pada daerah perkotaan tingkat ketimpangan cenderung meningkat dalam 6 tahun terakhir. Daerah perdesaan memiliki pola yang

berbeda dengan daerah perkotaan dimana pada periode 2008 sampai dengan tahun 2016 ketimpangan dapat dikatakan termasuk ketimpangan rendah (*low inequality*) karena pada periode tersebut porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah selalu berada di atas 17 persen. Sehingga secara umum pada periode tahun 2008 sampai 2016 dengan kriteria Bank Dunia maka pada daerah perkotaan memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Indikator rasio pengeluaran kelompok 20 persen teratas (Q_5) dengan 20 persen terendah (Q_1) juga dapat digunakan untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk secara umum. Semakin besar rasio (Q_5/Q_1) tersebut berarti ketimpangan pendapatan/pengeluaran semakin tinggi.

Tabel 3.11
Persentase Pembagian Pengeluaran Menurut Kelas Kuantil dan Daerah, 2015-2016

Kuantil	Kota		Desa		Kota+Desa	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Q_1	6,14	6,08	8,31	8,24	6,83	6,75
Q_2	9,69	9,83	12,11	12,16	10,27	10,27
Q_3	13,99	14,83	16,04	16,46	14,22	14,64
Q_4	20,61	21,91	21,49	22,03	20,43	21,44
Q_5	49,57	47,35	42,05	41,1	48,25	46,89
Rasio Q_5/Q_1	8,08	7,79	5,06	4,99	7,07	6,95

Sumber: Susenas Maret 2015 dan Maret 2016.

Pada periode 2015-2016 terjadi penurunan ketimpangan distribusi pendapatan yang ditunjukkan dengan berkurangnya rasio (Q_5/Q_1) dari 7,07 pada tahun 2015 menjadi 6,95 pada tahun 2016 (Tabel 3.11). Penurunan ini disebabkan oleh sumbangan peningkatan rata-rata pengeluaran pada kelompok penduduk 20 persen terbawah di daerah perkotaan dan terjadinya penurunan rata-rata pengeluaran 20 persen kelompok teratas baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.

Berdasarkan berbagai ukuran tingkat ketimpangan pendapatan seperti dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa tingkat ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Hal ini juga didukung

dengan rasio Q_5/Q_1 di perkotaan yang lebih besar dibandingkan dengan rasio Q_5/Q_1 di perdesaan pada periode tersebut.

3.6. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Rata-rata Pengeluaran Perkapita Menurut Status Kemiskinan, Tahun 2015-2016

Pada periode Maret 2015 - Maret 2016 jumlah penduduk sangat miskin relatif meningkat, tetapi pada kelompok penduduk lainnya yaitu kelompok rentan miskin, hampir miskin dan miskin mengalami penurunan pada periode ini (Tabel 3.12).

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk (000) Menurut Daerah dan Status Kemiskinan, 2015-2016

Daerah/Tahun	RML	HM	M	SM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota				
Maret 2015	19 983	10 732	6 901	3 752
Maret 2016	19 684	10 903	7 017	3 323
Desa				
Maret 2015	25 731	15 568	11 066	6 874
Maret 2016	24 642	15 307	10 195	7 470
Kota+Desa				
Maret 2015	45 714	26 300	17 967	10 626
Maret 2016	44 326	26 210	17 212	10 793

Keterangan:

SM : Sangat Miskin (pengeluaran perkapita/bulan < 0,8GK)

M : Miskin (0,8GK ≤ pengeluaran perkapita/bulan < 1 GK)

HM : Hampir Miskin (1GK ≤ pengeluaran perkapita/bulan < 1,2GK)

RML : Rentan Miskin Lainnya (1,2GK ≤ pengeluaran perkapita/bulan ≤ 1,6GK)

Persentase penduduk miskin pada Maret 2015 ke Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 5,39 persen yaitu dari 7,05 persen pada tahun 2015 menjadi 6,67 persen pada tahun 2016, sementara persentase penduduk sangat miskin mengalami peningkatan pada periode ini, persentasenya penduduk sangat miskin sedikit meningkat yaitu sekitar 0,48 persen (dari 4,17 menjadi 4,19). Pada kelompok penduduk hampir miskin mengalami penurunan sebesar 1,55 persen (dari 10,32 menjadi 10,16) kemudian pada kelompok penduduk rentan miskin lainnya mengalami penurunan sebesar 4,18 persen (dari 17,94 menjadi 17,19) (lihat Tabel 3.13).

Tabel 3.13
Persentase Penduduk Menurut Daerah dan Status Kemiskinan, 2015-2016

Daerah/Tahun	RML	HM	M	SM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota				
Maret 2015	15,55	8,35	5,37	2,92
Maret 2016	14,84	8,22	5,29	2,5
Desa				
Maret 2015	20,38	12,33	8,76	5,44
Maret 2016	19,68	12,22	8,14	5,96
Kota + Desa				
Maret 2015	17,94	10,32	7,05	4,17
Maret 2016	17,19	10,16	6,67	4,19

Keterangan:

SM : Sangat Miskin (pengeluaran perkapita/bulan < 0,8GK)

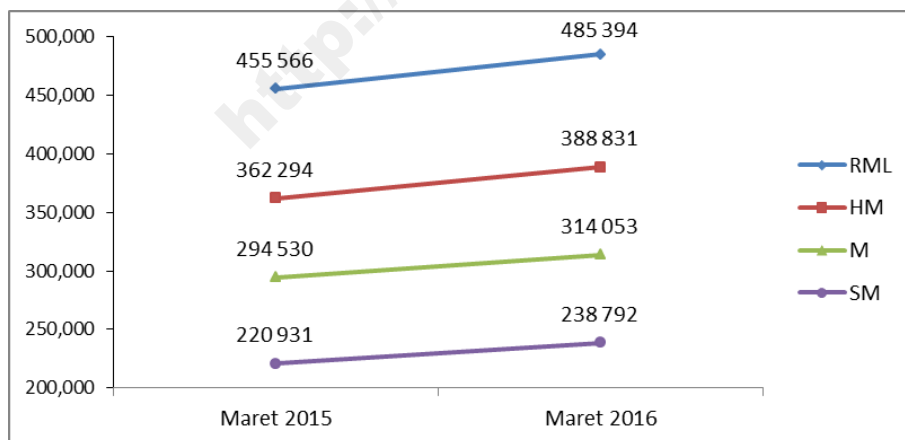
M : Miskin (0,8GK ≤ pengeluaran perkapita/bulan < 1 GK)

HM : Hampir Miskin (1GK ≤ pengeluaran perkapita/bulan < 1,2GK)

RML : Rentan Miskin Lainnya (1,2GK ≤ pengeluaran perkapita/bulan ≤ 1,6GK)

Selain dari segi jumlah dan persentase penduduk miskin, perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan, yang tercermin pada besaran dan pola pengeluaran penduduk.

Gambar 3.4
Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Perkapita/Bulan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Status Kemiskinan, 2015-2016



Berdasarkan Gambar 3.4 selama periode Maret 2015-Maret 2016 tingkat kesejahteraan penduduk secara umum mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Pertumbuhan pengeluaran perkapita penduduk sangat miskin pada periode ini sekitar 8,08 persen yaitu dari Rp. 220.931,- menjadi Rp. 238.792,- pada kelompok penduduk miskin rata-rata pengeluaran perkapita meningkat sekitar 6,63 persen yaitu dari Rp. 294.530,- menjadi Rp. 314.053,- pada kelompok penduduk hampir miskin rata-rata pengeluaran perkapita meningkat sekitar 7,32 persen yaitu dari Rp. 362.294,- menjadi Rp. 388.831,- dan pada kelompok penduduk rentan miskin lainnya rata-rata pengeluaran perkapita meningkat sekitar 6,55 persen yaitu dari Rp. 455.566 menjadi Rp. 485.394. Sehingga secara umum rata-rata pengeluaran perkapita per bulan pada semua kelompok mengalami peningkatan pada periode ini.

3.7. Kemiskinan Provinsi Tahun 2016

Tabel 3.14 dan 3.15 menyajikan informasi mengenai kemiskinan provinsi pada kondisi Maret 2016. Dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp 534.229,- dan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai garis kemiskinan terendah yaitu Rp 270.601,-. Dari Tabel 3.14 juga dapat diketahui bahwa untuk daerah perkotaan garis kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Rp 523.914,- yang diikuti oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 521.773,- sementara garis kemiskinan terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar Rp 273.224,-. Untuk daerah perdesaan, garis kemiskinan tertinggi ditempati oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Rp 546.998,- dan garis kemiskinan terendah di perdesaan tercatat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 263.674,-.

Tabel 3.14
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2016

Provinsi	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	427 970	403 985	410 956
Sumatera Utara	398 408	377 748	388 156
Sumatera Barat	441 523	413 790	425 141
Riau	426 346	425 777	426 001
Jambi	438 600	342 137	371 875
Sumatera Selatan	388 060	331 570	351 984
Bengkulu	430 572	409 863	416 427
Lampung	392 488	354 678	364 922
Bangka Belitung	521 773	546 998	534 229
Kepulauan Riau	494 418	466 989	490 157
DKI Jakarta	510 359	-	510 359
Jawa Barat	325 017	324 937	324 992
Jawa Tengah	315 269	319 188	317 348
DI Yogyakarta	364 786	331 308	354 084
Jawa Timur	319 662	323 779	321 761
Banten	377 052	347 765	367 949
Bali	348 571	322 660	338 967
NTB	343 580	326 656	333 996
NTT	386 139	306 721	322 947
Kalimantan Barat	353 143	345 480	347 880
Kalimantan Tengah	348 254	387 202	373 484
Kalimantan Selatan	386 462	370 612	377 480
Kalimantan Timur	519 653	495 975	511 205
Kalimantan Utara	523 914	499 980	513 614
Sulawesi Utara	312 328	321 985	317 478
Sulawesi Tengah	391 070	370 392	375 659
Sulawesi Selatan	281 676	263 674	270 601
Sulawesi Tenggara	289 827	271 961	277 288
Gorontalo	284 308	284 190	284 232
Sulawesi Barat	273 224	290 340	286 840
Maluku	412 980	415 177	414 302
Maluku Utara	390 788	371 289	376 554
Papua Barat	487 727	466 996	474 967
Papua	466 985	412 991	427 176
INDONESIA	364 527	343 647	354 386

Sumber: Susenas Maret 2016

Dengan menggunakan standar garis kemiskinan tiap provinsi yang dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan maka jumlah dan persentase penduduk miskin pada setiap provinsi menurut daerah perkotaan dan perdesaan dapat dihitung. Tabel 3.15 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah pada kondisi Maret 2016. Berdasarkan nilai persentase penduduk miskin tahun 2016 antar provinsi terdapat 17 provinsi yang dapat dikategorikan memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah (nilainya berada di bawah *hard core*, yaitu di bawah 10 persen). Ke-17 provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan (9,4 persen), Jawa Barat (8,95 persen), Jambi (8,41 persen), Sulawesi Utara (8,34 persen), Riau (7,98 persen), Kalimantan Barat (7,87 persen), Sumatera Barat (7,09 persen), Maluku Utara (6,33 persen), Kalimantan Utara (6,23 persen), Kalimantan Timur (6,11 persen), Kepulauan Riau (5,98 persen), Kalimantan Tengah (5,66 persen), Banten (5,42 persen), Bangka Belitung (5,22 persen), Kalimantan Selatan (4,85 persen), Bali (4,25 persen), dan DKI Jakarta (3,75 persen). Sedangkan 17 provinsi lainnya, terdapat 14 provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin diantara 10-20 persen dan 3 provinsi lainnya memiliki persentase penduduk miskin antara 20-30 persen. Provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar adalah Papua yang mencapai 28,54 persen.

Tabel 3.15
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah
Maret 2016

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	159,50	688,94	848,44	10,82	19,15	16,73
Sumatera Utara	690,80	765,15	1 455,95	9,75	10,97	10,35
Sumatera Barat	118,96	252,59	371,56	5,54	8,16	7,09
Riau	162,45	352,95	515,40	6,40	9,00	7,98
Jambi	115,35	174,46	289,80	10,86	7,32	8,41
Sumatera Selatan	374,53	726,67	1 101,19	12,74	13,99	13,54
Bengkulu	97,34	231,27	328,61	16,19	17,85	17,32
Lampung	233,39	936,21	1 169,60	10,53	15,69	14,29
Bangka Belitung	19,63	53,13	72,76	2,78	7,72	5,22
Kepulauan Riau	87,78	32,63	120,41	5,16	10,43	5,98
DKI Jakarta	384,30	-	384,30	3,75	-	3,75
Jawa Barat	2 497,59	1 726,73	4 224,33	7,67	11,80	8,95
Jawa Tengah	1 824,08	2 682,81	4 506,89	11,44	14,89	13,27
DI Yogyakarta	297,71	197,23	494,94	11,79	16,63	13,34
Jawa Timur	1 518,79	3 184,51	4 703,30	7,94	16,01	12,05
Banten	377,10	281,01	658,11	4,51	7,45	5,42
Bali	96,98	81,20	178,18	3,68	5,23	4,25
NTB	385,22	419,23	804,44	18,20	15,17	16,48
NTT	112,02	1 037,90	1 149,92	10,58	25,17	22,19
Kalimantan Barat	78,29	303,06	381,35	5,16	9,11	7,87
Kalimantan Tengah	41,07	102,42	143,49	4,60	6,23	5,66
Kalimantan Selatan	60,83	134,87	195,70	3,48	5,89	4,85
Kalimantan Timur	88,04	124,88	212,92	3,93	10,05	6,11
Kalimantan Utara	14,21	26,91	41,12	3,78	9,47	6,23
Sulawesi Utara	60,62	142,20	202,82	5,34	10,97	8,34
Sulawesi Tengah	75,45	345,07	420,52	10,18	15,91	14,45
Sulawesi Selatan	149,13	657,90	807,03	4,51	12,46	9,40
Sulawesi Tenggara	51,01	275,86	326,86	6,74	15,49	12,88
Gorontalo	24,08	179,11	203,19	5,84	24,41	17,72
Sulawesi Barat	22,85	129,88	152,73	8,59	12,56	11,74
Maluku	52,08	275,64	327,72	7,66	26,82	19,18
Maluku Utara	10,57	64,10	74,68	3,32	7,44	6,33
Papua Barat	20,96	204,85	225,80	6,14	37,48	25,43
Papua	37,08	874,25	911,33	4,42	37,14	28,54
Indonesia	10 339,77	17 665,62	28 005,39	7,79	14,11	10,86

Sumber: Susenas Maret 2016

3.8. Profil Rumah Tangga Miskin di Indonesia, Tahun 2016

3.8.1. Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (dilihat dari indikator rata-rata lamanya bersekolah kepala rumah tangga). Keempat karakteristik sosial demografi tersebut dibandingkan dengan melihat proporsi rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin dan tidak miskin (Tabel 3.16).

Rumah tangga miskin cenderung mempunyai anggota rumah tangga yang lebih banyak. Salah satu dampak dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar adalah terhambatnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak. Dari Tabel 3.16 terlihat secara rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin di Indonesia pada tahun 2016 yaitu 4,49 orang yang tercatat 4,57 orang di perkotaan dan 4,44 orang di perdesaan. Sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tidak miskin pada tahun yang sama sebesar 3,71 orang yang tercatat 3,74 orang di perkotaan dan 3,68 orang di perdesaan. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin yaitu 5 dibanding 4.

Akhir-akhir ini mulai bergulir berbagai tuntutan dan kebijakan dalam menyikapi isu kesetaraan gender dalam menghadapi kemajuan pembangunan dan teknologi informasi yang semakin pesat. Akan tetapi secara umum peran wanita sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya biasanya akan mengalami banyak kendala dibanding dengan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan kodrat wanita yang harus berperan ganda di dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah dan ibu yang harus melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anaknya. Dari Tabel 3.16 terlihat bahwa distribusi persentase wanita sebagai kepala rumah tangga miskin pada tahun 2016

mencapai 16,12 persen sedangkan pada kelompok rumah tangga tidak miskin tercatat 14,91 persen.

Tabel 3.16
Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin menurut Daerah, 2016

Karakteristik Rumah tangga/Daerah	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga :		
- Perkotaan (K)	4,57	3,74
- Perdesaan (D)	4,44	3,68
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	4,49	3,71
2. Persentase Wanita sebagai kepala rumah tangga :		
- Perkotaan (K)	16,92	15,32
- Perdesaan (D)	15,67	14,45
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	16,12	14,91
3. Rata-rata umur kepala rumah tangga (tahun) :		
- Perkotaan (K)	50,06	46,89
- Perdesaan (D)	49,65	48,05
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	49,80	47,44
4. Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun):		
- Perkotaan (K)	6,01	9,11
- Perdesaan (D)	4,85	6,38
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	5,27	7,82

Sumber: Susenas Maret 2016

Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat distribusi umur dan produktifitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, meskipun demikian hubungan antara kedua variabel tersebut tidak selalu linier, dari Tabel 3.16 terlihat bahwa rata-rata umur kepala rumah tangga miskin tercatat 49,80 tahun, angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata umur kepala rumah tangga tidak miskin yang tercatat sebesar 47,44 tahun.

Tabel 3.16 juga menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin lebih pendek dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak miskin, yaitu 5,27 tahun dibandingkan dengan 7,82 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah yang dijalani kepala rumah tangga miskin di perkotaan lebih lama dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu sebesar 6,01 tahun dibandingkan dengan 4,85 tahun. Keadaan ini diduga

karena sarana dan prasarana fasilitas pendidikan di perkotaan pada umumnya lebih baik dan lebih lengkap dibanding di perdesaan, di samping kondisi ekonomi dan kesadaran masyarakat di perkotaan akan pentingnya pendidikan lebih baik dibandingkan dengan di perdesaan.

Selain distribusi rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut jenis kelamin kepala rumah tangga, pada Tabel 3.17 ditunjukkan pula *Head Count Index* (besarnya persentase rumah tangga miskin dari jumlah rumah tangga menurut jenis kelamin kepala rumah tangga), *Head Count Index* untuk rumah tangga yang dikepalai oleh wanita tercatat sebesar 9,82 persen, dan rumah tangga yang dikepalai laki-laki nilai *Head Count Index* tercatat sebesar 9,03 persen. Dilihat menurut daerah, *Head Count Index* rumah tangga yang dikepalai oleh wanita tercatat sebesar 7,10 persen di perkotaan dan 12,84 persen di perdesaan. Sementara itu untuk rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki tercatat sebesar 6,36 persen di perkotaan dan 11,81 persen di perdesaan.

Tabel 3.17
Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2016

Karakteristik Rumah tangga/Daerah	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
1. Rumah tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	83,08	16,92
- Perdesaan (D)	84,33	15,67
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	83,88	16,12
2. Rumah tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	84,68	15,32
- Perdesaan (D)	85,55	14,45
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	85,09	14,91
3. <i>Head Count Index</i> :		
- Perkotaan (K)	6,36	7,10
- Perdesaan (D)	11,81	12,84
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	9,03	9,82

Sumber: Susenas Maret 2016

3.8.2. Karakteristik Pendidikan

Tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin.

Tabel 3.18
Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah tangga dan Daerah, 2016

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin dan Lainnya	Tidak Dapat Membaca dan Menulis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	48,96	1,79	39,84	9,41
- Perdesaan (D)	54,56	1,72	27,68	16,05
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	52,53	1,74	32,09	13,64
2. Rumahtangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	47,09	0,78	49,41	2,72
- Perdesaan (D)	52,00	1,37	38,96	7,68
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	49,41	1,06	44,47	5,06
3. <i>Head Count Index</i> :				
- Perkotaan (K)	6,72	13,73	5,29	19,33
- Perdesaan (D)	12,48	14,54	8,80	22,13
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	9,67	14,23	6,77	21,35

Sumber: Susenas Maret 2016

Pada Tabel 3.18, kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin yang tergolong buta huruf (tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya) tercatat sebesar 13,64 persen, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin hanya 5,06 persen. Jika dilihat menurut daerah perkotaan dan perdesaan terlihat bahwa persentase kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin yang buta huruf di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Sementara itu *Head Count Index* untuk rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya buta huruf tercatat sebesar 21,35 persen dengan komposisi 19,33 persen di perkotaan dan 22,13 persen di perdesaan.

Pada Tabel 3.19 disajikan distribusi karakteristik tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut daerah. Terlihat bahwa persentase kepala rumah tangga miskin yang tidak tamat SD dan tamat SD berturut-turut sebesar 37,85 persen dan 42,95 persen, sedangkan persentase kepala rumah tangga tidak miskin masing-masing hanya 20,43 persen yang tidak tamat SD dan 36,81 persen yang berhasil tamat SD. Indikasi ini menunjukkan bahwa mereka yang tergolong miskin cenderung berpendidikan rendah, perubahan kebijakan wajib belajar 9 tahun juga turut berpengaruh terhadap distribusi kepala rumah tangga menurut tingkat pendidikan terakhirnya meskipun pergeseran tersebut belum mampu membebaskan mereka dari kemiskinan.

Tabel 3.19
Persentase Rumah tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Pendidikan Kepala Rumah tangga dan Daerah, 2016

Karakteristik Rumahtangga/ Daerah	Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Rumah tangga Miskin :					
- Perkotaan (K)	30,55	43,13	9,53	15,49	1,29
- Perdesaan (D)	42,00	42,85	6,11	8,52	0,52
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	37,85	42,95	7,35	11,05	0,80
2. Rumah tangga Tidak Miskin :					
- Perkotaan (K)	13,25	30,67	9,94	32,79	13,35
- Perdesaan (D)	28,46	43,67	8,54	15,35	3,98
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	20,43	36,81	9,28	24,55	8,93
3. <i>Head Count Index</i> :					
- Perkotaan (K)	13,77	8,88	6,23	3,17	0,67
- Perdesaan (D)	16,70	11,76	8,86	7,01	1,74
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	15,72	10,52	7,39	4,34	0,89

Sumber: Susenas Maret 2016

Pada tabel yang sama juga terlihat bahwa distribusi persentase kepala rumah tangga tidak miskin lebih tinggi dibanding persentase kepala rumah tangga miskin pada tingkat pendidikan terakhir SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Jika ditinjau menurut daerah, distribusi persentase kepala rumah tangga miskin yang tidak tamat SD dan tamat SD di perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Sebaliknya distribusi persentase kepala

rumah tangga miskin yang tamat SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.

Di samping distribusi rumah tangga miskin menurut pendidikan tertinggi kepala rumah tangga dapat dilihat pula *Head Count Index* (HCI) untuk masing-masing pendidikan kepala rumah tangga, Nilai HCI untuk masing-masing jenjang pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tercatat untuk tidak tamat SD sebesar 15,72 persen, tamat SD sebesar 10,52 persen, tamat SLTP sebesar 7,39 persen, tamat SLTA sebesar 4,34 persen, dan tamat Perguruan Tinggi sebesar 0,89 persen.

Jika ditinjau menurut daerah, *Head Count Index* untuk tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, dan Perguruan Tinggi di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan.

3.8.3. Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga.

Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan.

Distribusi rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga disajikan pada Tabel 3.20. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja sebesar 14,59 persen, bekerja di sektor pertanian sebesar 50,84 persen, bekerja di sektor industri sebesar 5,31 persen, dan bekerja di sektor lainnya sebesar 29,26 persen. Pola distribusi tersebut mengindikasikan bahwa lebih dari separuh kepala rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Jika dilihat lebih rinci, menurut daerah tempat tinggal rumah tangga miskin, dapat diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian tinggal di daerah perdesaan yaitu sebesar 65,62 persen sedangkan 24,88 persen tinggal di daerah perkotaan. Jadi, secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar orang miskin bekerja di sektor pertanian dan berdomisili di perdesaan.

Pola distribusi rumah tangga tidak miskin menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga berbeda dengan pola pada rumah tangga miskin. Hanya 29,77 persen kepala rumah tangga tidak miskin yang bekerja di sektor pertanian. Persentase kepala rumah tangga tidak miskin yang bekerja di sektor industri dan sektor lainnya masing-masing sebesar 8,42 persen dan 49,04 persen.

Tabel 3.20
Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga dan Daerah, 2016

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah	Tidak Bekerja	Pertanian	Industri	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	18,47	24,88	8,86	47,79
- Perdesaan (D)	12,38	65,62	3,28	18,72
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	14,59	50,84	5,31	29,26
2. Rumah tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	16,16	9,80	11,30	62,73
- Perdesaan (D)	8,98	52,07	5,21	33,75
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	12,77	29,77	8,42	49,04
3. <i>Head Count Index</i> :				
- Perkotaan (K)	7,33	14,95	5,15	5,01
- Perdesaan (D)	15,78	14,62	7,89	7,01
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	10,32	14,68	5,97	5,67

Sumber: Susenas Maret 2016

Apabila distribusi rumah tangga tidak miskin menurut sumber penghasilan utama kepala rumah tangga ditinjau menurut daerah, terlihat bahwa persentase rumah tangga tidak miskin untuk sektor pertanian di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 9,80

persen dan 52,07 persen. Sedangkan rumah tangga tidak miskin yang sumber penghasilan utamanya di sektor industri dan lainnya tercatat di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan.

Pada Tabel 3.20 juga terlihat bahwa *Head Count Index* untuk kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja tercatat sebesar 10,32 persen (7,33 persen di perkotaan dan 15,78 persen di perdesaan). Tingginya angka *Head Count Index* di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga yang tidak bekerja lebih banyak ditemukan di perdesaan daripada di perkotaan. Sementara itu rumah tangga miskin yang menggantungkan hidupnya dari sektor industri sebagai sumber penghasilan utama kepala rumah tangganya tercatat sebesar 5,97 persen dimana sebesar 5,15 persen di perkotaan dan 7,89 persen di perdesaan. Angka *Head Count Index* rumah tangga miskin sumber penghasilan utamanya sektor lainnya tercatat sebesar 5,67 persen (5,01 persen di perkotaan dan 7,01 persen di perdesaan).

Status pekerjaan juga dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Distribusi rumah tangga miskin menurut status pekerjaan utama kepala rumah tangga yang disajikan pada Tabel 3.21 terlihat bahwa 46,18 persen diantaranya berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; 1,90 persen berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; 35,95 persen berstatus sebagai pekerja dibayar (buruh/karyawan/ pegawai) dan pekerja bebas (baik di pertanian maupun di non pertanian); dan hanya 1,39 persen yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar.

Tabel 3.21
Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut
Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Dan Daerah, 2016

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah	Tidak Bekerja	1 & 2	3	4 & 5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Rumah tangga Miskin :					
- Perkotaan (K)	18,47	30,60	1,65	48,12	1,16
- Perdesaan (D)	12,38	55,05	2,04	29,01	1,52
- Perkotaan + Perdesaan (K+D)	14,59	46,18	1,90	35,95	1,39
2. Rumah tangga Tidak Miskin :					
- Perkotaan (K)	16,16	24,97	4,15	53,63	1,09
- Perdesaan (D)	8,98	49,84	4,24	35,68	1,27
- Perkotaan + Perdesaan (K+D)	12,77	36,72	4,19	45,15	1,17
3. <i>Head Count Index</i> :					
- Perkotaan (K)	7,33	7,82	2,68	5,85	6,89
- Perdesaan (D)	15,78	13,05	6,13	9,95	14,01
- Perkotaan + Perdesaan (K+D)	10,32	11,24	4,36	7,42	10,67

Sumber: Susenas Maret 2016

Keterangan:

- | | |
|---|--|
| 1. Berusaha sendiri | 4. Buruh/Karyawan/Pegawai |
| 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 5. Pekerja bebas |
| 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar |

Apabila ditinjau menurut daerah, terdapat perbedaan pada rumah tangga miskin yang berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berstatus sebagai pekerja dibayar (buruh/ karyawan/pegawai), dan pekerja bebas. Adapun untuk kepala rumah tangga miskin yang berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar tercatat 30,60 persen di perkotaan dan 55,05 persen di perdesaan. Sebaliknya kepala rumah tangga miskin yang berstatus sebagai pekerja dibayar dan pekerja bebas tercatat sebesar 48,12 persen di perkotaan dan 29,01 persen di perdesaan.

Distribusi rumah tangga tidak miskin menurut status pekerjaan utama kepala rumah tangga terlihat bahwa 36,72 persen diantaranya berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; 4,19 persen berstatus sebagai berusaha dibantu buruh

tetap/buruh dibayar; 45,15 persen berstatus sebagai pekerja dibayar (buruh/karyawan/ pegawai) dan pekerja bebas (baik di pertanian maupun di non pertanian); dan hanya 1,17 persen yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar.

Apabila distribusi rumah tangga tidak miskin berdasarkan status pekerjaan utama kepala rumah tangganya ditinjau menurut daerah, untuk kepala rumah tangga tidak miskin yang berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar tercatat 24,97 persen di perkotaan dan 49,84 persen di perdesaan. Sebaliknya kepala rumah tangga tidak miskin yang berstatus sebagai pekerja dibayar dan pekerja bebas tercatat sebesar 53,63 persen di perkotaan dan 35,68 persen di perdesaan.

Tabel 3.21 juga menyajikan angka *Head Count Index* untuk masing-masing kategori status pekerjaan. Untuk rumah tangga yang berstatus berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar nilai *Head Count Index* tercatat sebesar 11,24 persen. Dari Tabel 3.21 juga terlihat nilai *Head Count Index* untuk rumah tangga yang berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah sebesar 4,36 persen; untuk yang berstatus sebagai pekerja dibayar dan pekerja bebas sebesar 7,42 persen; dan 10,67 persen untuk yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar.

Apabila ditinjau menurut daerah, *Head Count Index* (HCI) pada masing-masing status pekerjaan utama di perkotaan tercatat lebih rendah dibanding di perdesaan. Dari Tabel 3.21 terlihat *Head Count Index* rumah tangga miskin yang status pekerjaan utama kepala rumah tangganya berstatus berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar tercatat sebesar 7,82 persen di perkotaan dan 13,05 persen di perdesaan; untuk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar tercatat sebesar 2,68 persen di perkotaan dan 6,13 persen di perdesaan; untuk yang berstatus sebagai pekerja dibayar dan pekerja bebas sebesar 5,85 persen di perkotaan dan 9,95 persen di perdesaan; dan untuk yang berstatus pekerja tidak dibayar sebesar 6,89 persen di perkotaan dan 14,01 di perdesaan.

3.8.4. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

a. Luas Lantai

Salah satu indikator perumahan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga adalah keleluasaan pribadi (*privacy*) dalam tempat tinggal. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah perkapita (m^2). Menurut Kementerian Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapitanya minimal $8 m^2$ (BPS, 2001). Pada Tabel 3.22 menyajikan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan luas lantai perkapita.

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut kategori luas lantai rumah per kapita yang disajikan pada Tabel 3.22 tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita $\leq 8 m^2$ (27,79 persen) lebih rendah dibandingkan dengan kategori luas lantai per kapita 9-15 m^2 (38,21 persen) dan luas lantai per kapita $> 15 m^2$ (34,00 persen). Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin luas lantai rumah per kapitanya sudah memenuhi salah satu syarat rumah sehat.

Tabel 3.22
Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Daerah dan Luas Lantai per Kapita (m^2), 2016

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah	≤ 8	$8 < \text{Luas} \leq 15$	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	29,09	39,22	31,69
- Perdesaan (D)	27,05	37,64	35,31
- Perkotaan + Perdesaan (K+D)	27,79	38,21	34,00
2. Rumah tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	13,21	28,62	58,17
- Perdesaan (D)	9,00	30,10	60,90
- Perkotaan + Perdesaan (K+D)	11,22	29,32	59,46
3. <i>Head Count Index</i> :			
- Perkotaan (K)	13,23	8,67	3,64
- Perdesaan (D)	29,00	14,52	7,30
- Perkotaan + Perdesaan (K+D)	19,96	11,60	5,45

Sumber: Susenas Maret 2016

Pada rumah tangga tidak miskin, jumlah rumah tangga yang menempati luas lantai perkapita $> 15 \text{ m}^2$ tercatat paling tinggi dibandingkan kategori luas lantai lainnya, yaitu sebesar 59,46 persen (58,17 persen di perkotaan dan 60,90 persen di perdesaan). Sementara itu, untuk kategori luas lantai perkapita $\leq 8 \text{ m}^2$ tercatat hanya sebesar 11,22 persen (13,21 persen di perkotaan dan 9,00 persen di perdesaan) dan sebesar 29,32 persen (28,62 persen di perkotaan dan 30,10 persen di perdesaan) sisanya menempati rumah dengan luas lantai per kapita diantara 9-15 m^2 .

Pada Tabel 3.22 disajikan pula angka *Head Count Index* menurut luas lantai rumah per kapita. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga miskin menghuni rumah dengan luas lantai per kapita $\leq 8 \text{ m}^2$ yaitu sebesar 19,96 persen dari jumlah rumah tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai per kapita $\leq 8 \text{ m}^2$. Untuk rumah tangga miskin yang menghuni rumah dengan kategori luas lantai per kapita diantara 9-15 m^2 hanya sebesar 11,60 persen dan 5,45 persen untuk luas lantai perkapita $> 15 \text{ m}^2$. Apabila ditinjau menurut daerah, angka *Head Count Index* dari rumah tangga dengan luas lantai perkapita tidak lebih dari 8 m^2 tercatat 13,23 persen di perkotaan dan 29,00 persen di perdesaan.

b. Jenis Lantai

Tabel 3.23 menyajikan karakteristik rumah tangga (miskin dan tidak miskin) berdasarkan jenis lantai rumah terluas. *Head Count Index* untuk jenis lantai bukan tanah sebesar 8,12 persen dan untuk jenis lantai tanah sebesar 24,52 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa rumah tangga dengan jenis lantai tanah cenderung lebih miskin dibandingkan dengan rumah yang jenis lantainya bukan tanah. Tetapi perlu diketahui bahwa penggunaan jenis lantai tanah di beberapa daerah merupakan bagian dari *sosio-kultural* masyarakat tersebut.

Tabel 3.23
Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas, 2016

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah	Bukan Tanah	Tanah
(1)	(2)	(3)
1. Rumah tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	91,05	8,95
- Perdesaan (D)	78,65	21,35
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	83,15	16,85
2. Rumah tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	98,11	1,89
- Perdesaan (D)	91,05	8,95
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	94,78	5,22
3. <i>Head Count Index</i> :		
- Perkotaan (K)	6,04	24,73
- Perdesaan (D)	10,50	24,47
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	8,12	24,52

Sumber: Susenas Maret 2016

Apabila dibandingkan antara kategori rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut jenis lantai rumah terluas, dari Tabel 3.23 terlihat jelas ada perbedaan yang cukup berarti. Persentase rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jenis lantai terluas bukan tanah lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin, dan hal ini berlaku baik di perkotaan maupun di perdesaan.

c. Jenis Atap

Tabel 3.24 menyajikan profil rumah tangga miskin menurut jenis atap rumah terluas. *Head Count Index* untuk variabel masing-masing jenis atap rumah adalah tercatat 9,25 persen untuk atap beton/genteng/sirap, 8,13 persen untuk atap seng/asbes, 27,39 persen untuk rumah tangga dengan atap ijuk/rumbia, dan 15,07 persen untuk atap lainnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jenis atap ijuk/rumbia dan atap lainnya merupakan jenis atap yang sering digunakan oleh rumah tangga miskin dibandingkan jenis atap lainnya.

Tabel 3.24
Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas, 2016

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah	Beton/ Genteng/ Sirap	Seng/ Asbes	Ijuk/ Rumbia	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	69,41	29,53	0,96	0,10
- Perdesaan (D)	57,48	34,79	7,26	0,47
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	61,81	32,88	4,97	0,34
2. Rumah tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	63,81	35,84	0,20	0,14
- Perdesaan (D)	57,98	39,18	2,58	0,25
- Perkotaan + Perdesaan (K+D)	61,06	37,42	1,33	0,19
3. <i>Head Count Index</i> :				
- Perkotaan (K)	7,01	5,40	24,66	4,85
- Perdesaan (D)	11,87	10,76	27,62	20,48
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	9,25	8,13	27,39	15,07

Sumber: Susenas Maret 2016

Apabila dibandingkan distribusi rumah tangga miskin dengan rumah tangga tidak miskin berdasarkan jenis atap rumah, terlihat bahwa distribusi persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jenis atap ijuk/rumbia dan lainnya lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

d. Jenis Dinding

Berdasarkan jenis dinding rumah, dari Tabel 3.25 terlihat bahwa *Head Count Index* untuk dinding tembok tercatat sebesar 6,49 persen; 13,91 persen untuk dinding kayu; 22,82 persen untuk dinding bambu; dan 17,74 persen untuk dinding lainnya. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan dinding kayu, bambu, dan lainnya lebih banyak ditemukan di perdesaan dibanding di perkotaan. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan dinding tembok lebih banyak ditemukan di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan.

Tabel 3.25 juga menunjukkan adanya perbedaan distribusi persentase rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin menurut jenis sebagian besar dinding rumah. Persentase rumah tangga tidak miskin dengan jenis dinding tembok lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin, baik di

perkotaan maupun di pedesaan. Sedangkan jenis dinding kayu, bambu, dan lainnya terlihat lebih tinggi pada rumah tangga miskin dibanding rumah tangga tidak miskin.

Tabel 3.25
Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas, 2016

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	69,06	16,26	13,06	1,63
- Perdesaan (D)	42,18	34,78	19,41	3,64
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	51,93	28,06	17,10	2,91
2. Rumah tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	87,88	8,27	3,04	0,81
- Perdesaan (D)	61,28	27,80	8,94	1,97
- Perkotaan + Perdesaan (K+D)	75,32	17,50	5,83	1,36
3. <i>Head Count Index</i> :				
- Perkotaan (K)	5,16	11,98	22,90	12,27
- Perdesaan (D)	8,55	14,53	22,78	20,02
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	6,49	13,91	22,82	17,74

Sumber: Susenas Maret 2016

e. Jenis Penerangan

Indikator perumahan lainnya adalah jenis penerangan rumah yang dibedakan atas listrik PLN, listrik non PLN, dan bukan listrik. Dari Tabel 3.26 dapat diketahui penggunaan listrik PLN di rumah tangga miskin dan tidak miskin lebih tinggi dibandingkan penggunaan listrik Non PLN maupun bukan listrik. Persentase rumah tangga miskin yang sudah menggunakan listrik PLN yaitu sebesar 89,17 persen; untuk listrik Non PLN hanya sebesar 3,20 persen dan bukan listrik sebesar 7,63 persen. Sedangkan untuk rumah tangga tidak miskin penggunaan listrik PLN sebesar 95,51 persen, listrik Non PLN sebesar 2,64 persen, dan bukan listrik sebesar 1,85 persen.

Tabel 3.26 juga menyajikan *Head Count Index* menurut ketiga jenis penerangan, yaitu sebesar 8,60 persen untuk jenis penerangan listrik PLN, 10,87 persen untuk listrik non PLN dan 29,39 persen yang menggunakan bukan listrik. Hal ini mengindikasikan bahwa persentase rumah tangga

miskin yang menggunakan sumber penerangan PLN lebih sedikit dibandingkan rumah tangga miskin yang menggunakan listrik non PLN dan bukan listrik sebagai sumber penerangan.

Tabel 3.26
Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah, 2016

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	97,81	1,35	0,84
- Perdesaan (D)	84,25	4,25	11,50
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	89,17	3,20	7,63
2. Rumah tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	99,08	0,78	0,13
- Perdesaan (D)	91,52	4,72	3,76
- Perkotaan + Perdesaan (K+D)	95,51	2,64	1,85
3. <i>Head Count Index</i> :			
- Perkotaan (K)	6,40	10,64	30,60
- Perdesaan (D)	11,12	10,91	29,34
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	8,60	10,87	29,39

Sumber: Susenas Maret 2016

f. Sumber Air

Ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga merupakan indikator perumahan yang juga dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Air bersih dalam uraian berikutnya didefinisikan air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat sejauh lebih dari 10 meter. Ketidaktersediaan air bersih di rumah tangga adalah salah satu indikasi dari kemiskinan.

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan air bersih tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang telah menikmati ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum tercatat sebesar 53,83 persen. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang belum menikmati ketersediaan air bersih tercatat sebesar 46,17 persen (Tabel 3.27).

Sementara itu, jika ditinjau menurut daerah tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 64,50 persen berbanding 47,76 persen. Hal yang sebaliknya berlaku pada rumah tangga miskin yang belum menikmati ketersediaan air bersih, yaitu 35,50 persen di perkotaan dan 52,24 persen di perdesaan.

Dilihat dari distribusi rumah tangga tidak miskin menurut ketersediaan air bersih tampak bahwa persentase rumah tangga tidak miskin yang telah menikmati ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum tercatat sebesar 72,32 persen, sedangkan persentase rumah tangga tidak miskin yang belum menikmati ketersediaan air bersih tercatat sebesar 27,68 persen. Distribusi persentase rumah tangga miskin yang telah menikmati ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum lebih kecil dibanding pada rumah tangga tidak miskin. Indikasi tersebut menguatkan dugaan bahwa rumah tangga miskin memiliki keterbatasan dalam ketersediaan air bersih sebagai salah satu fasilitas penting kategori rumah sehat.

Tabel 3.27
Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah Tangga, 2016

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah	Air Bersih ^{*)}	Lainnya
(1)	(2)	(3)
1. Rumah tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	64,50	35,50
- Perdesaan (D)	47,76	52,24
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	53,83	46,17
2. Rumah tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	82,65	17,35
- Perdesaan (D)	60,78	39,22
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	72,32	27,68
3. <i>Head Count Index</i> :		
- Perkotaan (K)	5,13	12,41
- Perdesaan (D)	9,65	15,32
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	6,97	14,38

Sumber: Susenas Maret 2016

Keterangan :

^{*)} Air Bersih meliputi : Air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat sejauh lebih dari 10 meter

Jika distribusi rumah tangga tidak miskin yang telah menikmati ketersediaan air bersih ditinjau menurut daerah tampak juga bahwa persentase rumah tangga tidak miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 82,65 persen dibanding 60,78 persen. Hal yang sebaliknya berlaku pada rumah tangga tidak miskin yang belum menikmati ketersediaan air bersih, yaitu 17,35 persen di perkotaan dan 39,22 persen di perdesaan.

Head Count Index menurut ketersediaan air bersih menunjukkan bahwa hanya terdapat 6,97 persen rumah tangga miskin dari seluruh rumah tangga yang memiliki ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum. Pada Tabel 3.27 juga tercatat sebesar 14,38 persen rumah tangga dikategorikan miskin dari seluruh rumah tangga yang tidak mampu menyediakan air bersih sebagai sumber air minum. Rendahnya angka *Head Count Index* menurut ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum mengindikasikan pentingnya perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas penyediaan air bersih bagi rumah tangga miskin.

Apabila *Head Count Index* ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum ditinjau menurut daerah, persentase rumah tangga miskin yang mampu menyediakan air bersih di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 5,13 persen dibanding 9,65 persen. Begitu pula untuk rumah tangga miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan air bersih, di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 12,41 persen dibanding 15,32 persen.

g. Jenis Jamban

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Di samping ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yang dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal, dan jamban umum/tidak ada.

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri tercatat sebesar 57,08 persen dan yang

menggunakan jamban bersama/komunal sebesar 12,10 persen (Tabel 3.28). Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban tercatat sebesar 30,82 persen. Tingginya persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban mencerminkan rendahnya kemampuan ekonomi rumah tangga.

Jika distribusi rumah tangga miskin ditinjau menurut daerah tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 65,87 persen dibanding 52,08 persen. Pola yang sama juga berlaku bagi rumah tangga miskin yang menggunakan jamban bersama/komunal. Hal yang sebaliknya terjadi pada rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum/tidak ada jamban, yaitu 20,69 persen di perkotaan dan 36,58 persen di perdesaan.

Tabel 3.28
Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Daerah dan Jenis Jamban Rumah Tangga, 2016

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah	Jamban Sendiri	Jamban Bersama/ Komunal	Jamban Umum/ Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	65,87	13,45	20,69
- Perdesaan (D)	52,08	11,33	36,58
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	57,08	12,10	30,82
2. Rumah tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	83,64	10,63	5,72
- Perdesaan (D)	71,34	9,42	19,24
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	77,83	10,06	12,11
3. <i>Head Count Index</i> :			
- Perkotaan (K)	5,17	8,05	20,02
- Perdesaan (D)	9,02	14,06	20,53
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	6,88	10,81	20,40

Sumber: Susenas Maret 2016

Dilihat dari distribusi rumah tangga tidak miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas jamban tampak bahwa rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri tercatat sebesar 77,83 persen. Sedangkan yang menggunakan jamban bersama/komunal tercatat sebesar

10,06 persen dan 12,11 persen sisanya menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas jamban sama sekali. Distribusi persentase rumah tangga miskin yang telah menggunakan jamban sendiri masih jauh lebih kecil dibanding pada rumah tangga tidak miskin. Indikasi tersebut menguatkan dugaan bahwa rumah tangga miskin memiliki keterbatasan dalam penyediaan fasilitas jamban sendiri sebagai salah satu fasilitas penting untuk dapat dikategorikan sebagai rumah sehat.

Jika dilihat menurut daerah, tercatat persentase rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 83,64 persen dibanding 71,34 persen. Pola yang sama juga tampak pada rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban bersama/komunal, yaitu 10,63 persen di perkotaan dan 9,42 persen di perdesaan. Hal yang sebaliknya terjadi pada rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas jamban, yaitu 5,72 persen di perkotaan dan 12,11 persen di perdesaan.

Dari Tabel 3.28 juga terlihat angka *Head Count Index* menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas jamban sendiri menunjukkan bahwa terdapat 6,88 persen rumah tangga dikategorikan miskin dari jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri. Sementara itu, angka *Head Count Index* untuk jamban bersama/komunal sebesar 10,81 persen dan 20,40 persen untuk rumah tangga yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas jamban. Indikasi di atas menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin tidak memiliki jamban sendiri.

Apabila *Head Count Index* ketersediaan dan penggunaan fasilitas jamban ditinjau menurut daerah, persentase rumah tangga miskin dari jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri lebih rendah di perkotaan dibanding di perdesaan, yaitu 5,17 persen dibanding 9,02 persen. Pola yang sama juga terjadi pada rumah tangga miskin yang menggunakan jamban bersama/komunal, yaitu 8,05 persen di perkotaan dan 14,06 persen di perdesaan. Hal yang sebaliknya berlaku untuk rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki fasilitas jamban, yaitu 20,02 persen di perkotaan dan 20,53 persen di perdesaan.

h. Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal

Ketika masyarakat penganut paham persamaan (*egalitarian society*) memberi perhatian tentang status kepemilikan rumah, disana akan mempertimbangkan antara insentif pribadi dan hak kekayaan sosial yang keduanya seringkali saling berlawanan. Meskipun begitu kedua pilihan tersebut harus diharmonisasikan. Suatu bangsa yang mengenyampingkan penekanan terhadap hak kekayaan sosial harus mengambil pertimbangan insentif pribadi untuk memotivasi masyarakat bekerja keras. Status pemilikan rumah tempat tinggal akan dibedakan atas tiga kelompok, yaitu rumah sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa, dan lain-lain).

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut status kepemilikan rumah tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri sebesar 87,62 persen dan yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 3,57 persen. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan status kepemilikan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa, dan lain-lain) sebesar 8,81 persen (Tabel 3.29).

Jika distribusi rumah tangga miskin ditinjau menurut daerah tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 77,75 persen dan 93,23 persen. Pola yang sebaliknya berlaku bagi rumah tangga miskin yang menempati rumah kontrak/sewa, yaitu 8,61 persen di perkotaan dan hanya 0,70 persen di perdesaan. Hal yang sama juga berlaku pada rumah tangga miskin yang menempati rumah lainnya, yaitu 13,64 persen di perkotaan dan 6,07 persen di perdesaan.

Dilihat dari distribusi rumah tangga tidak miskin menurut status kepemilikan rumah tampak bahwa persentase rumah tangga tidak miskin yang menempati rumah sendiri sebesar 82,07 persen. Sedangkan persentase rumah tangga tidak miskin yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 9,01 persen dan 8,91 persen sisanya menempati rumah lainnya.

Tabel 3.29
Persentase Rumah Tangga Miskin, Tidak Miskin, dan *Head Count Index* Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal, 2016

Karakteristik Rumah tangga/ Daerah	Sendiri	Kontrak/ Sewa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	77,75	8,61	13,64
- Perdesaan (D)	93,23	0,70	6,07
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	87,62	3,57	8,81
2. Rumah tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	73,70	15,85	10,45
- Perdesaan (D)	91,43	1,38	7,20
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	82,07	9,01	8,91
3. <i>Head Count Index</i> :			
- Perkotaan (K)	6,81	3,63	8,29
- Perdesaan (D)	12,17	6,46	10,28
- Perkotaan+Perdesaan (K+D)	9,71	3,84	9,06

Sumber : Susenas Maret 2016

Jika distribusi rumah tangga tidak miskin yang menempati rumah sendiri ditinjau menurut daerah tampak juga bahwa persentase rumah tangga tidak miskin di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di perdesaan, yaitu 73,70 persen dibanding 91,43 persen. Pola yang sebaliknya berlaku bagi rumah tangga tidak miskin yang menempati rumah kontrak/sewa, yaitu 15,85 persen di perkotaan dan hanya 1,38 persen di perdesaan. Hal yang sama juga berlaku pada rumah tangga tidak miskin yang menempati rumah lainnya, yaitu 10,45 persen di perkotaan dan 7,20 persen di perdesaan.

Pada Tabel 3.29 juga disajikan angka *Head Count Index* menurut status pemilikan rumah tempat tinggal. Dari tabel tersebut tercatat *Head Count Index* untuk rumah sendiri sebesar 9,71 persen, untuk kontrak/sewa sebesar 3,84 persen berstatus kontrak/sewa, sisanya sebesar 9,06 persen berstatus rumah lainnya (dinas, famili, bebas sewa, dan lain-lain).

Jika angka *Head Count Index* ini ditinjau menurut daerah maka terlihat bahwa rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri, kontrak/sewa, dan status lainnya lebih banyak yang berdomisili di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan rumah kontrak/sewa dan lainnya baik di perkotaan maupun di perdesaan.

BAB IV

PENARGETAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan yaitu: (1) Pro-pertumbuhan (*pro-growth*), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi; (2) Pro-Lapangan Kerja (*pro-job*), agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat karya; (3) Pro-Masyarakat Miskin (*pro-poor*), agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayanan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Perlindungan sosial merupakan salah satu dari tiga strategi pembangunan pemerintah. Berbagai program bantuan dan perlindungan sosial pemerintah seperti Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Untuk memenuhi kebutuhan data yang dapat digunakan untuk program-program tersebut, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik mengumpulkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial. Pendataan program perlindungan sosial yang pernah dilakukan BPS antara lain Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS08), Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011) dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT 2015).

4.1. Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE05)

Data kemiskinan yang selama ini dihitung dari Susenas merupakan data makro berupa perkiraan penduduk miskin di Indonesia yang hanya dapat disajikan sampai tingkat provinsi/kabupaten. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) dimaksudkan untuk mendapatkan data

kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berisi nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka. Berbeda dengan data kemiskinan makro, penentuan rumah tangga penerima BLT pada PSE05 didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (*non-monetary approach*).

Adapun indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, yaitu :

1. Luas lantai rumah
2. Jenis lantai rumah
3. Jenis dinding rumah
4. Fasilitas tempat buang air besar
5. Sumber air minum
6. Penerangan yang digunakan
7. Bahan bakar yang digunakan
8. Frekuensi makan dalam sehari
9. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu
10. Kemampuan membeli pakaian.
11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga
13. Pendidikan kepala rumah tangga
14. Kepemilikan aset.

Metode yang digunakan dalam penentuan kategori rumah tangga penerima BLT adalah dengan menggunakan sistem skoring yaitu setiap variabel diberi skor yang diberi bobot dan bobotnya didasarkan kepada besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel dan besarnya bobot berbeda di setiap kabupaten. Dari bobot masing-masing variabel terpilih untuk tiap kabupaten/kota selanjutnya dihitung indeks skor rumah tangga penerima BLT dari hasil PSE05 dengan formula:

$$I_{RM} = \sum W_i X_i ,$$

- W_i = bobot variabel terpilih, dan $\sum W_i = 1$
 X_i = nilai skor variabel terpilih (skor 1 untuk jawaban yang mengindikasikan miskin dan skor 0 untuk jawaban yang mengindikasikan tidak miskin).
 I_{RM} = indeks rumah tangga penerima BLT, dengan nilai antara 0 dan 1.

Berdasarkan nilai I_{RM} , selanjutnya semua rumah tangga diurutkan dari nilai I_{RM} terbesar sampai terkecil. Semakin tinggi nilai I_{RM} maka semakin miskin rumah tangga tersebut.

4.2. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS08)

Pada tahun 2008 BPS melakukan pemutakhiran (*updating*) data Rumah Tangga Sasaran Bantuan Langsung Tunai (RTS BLT). Pemutakhiran data tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 yang selanjutnya disingkat menjadi PPLS08.

Tujuan dilaksanakan kegiatan PPLS08 adalah :

1. Memperbaharui *database* RTS, yaitu untuk mendapatkan daftar nama dan alamat RTS:
 - a. Membuang data rumah-rumah tangga penerima BLT 2005 yang sudah meninggal dunia tanpa ahli waris yang berada pada rumah tangga yang sama.
 - b. Membuang data rumah-rumah tangga penerima BLT 2005 yang tidak layak sebagai sasaran program karena status ekonominya sudah tidak miskin lagi.
 - c. Memasukkan data rumah-rumah tangga sasaran baru, baik mereka adalah rumahtangga yang sebelumnya telah tercatat tetapi pindah tempat tinggal atau mereka yang belum pernah tercatat sama sekali.
2. Memperbaharui informasi tentang kehidupan sosial ekonomi RTS khususnya tentang kualitas tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga.

3. Menambah data anggota rumah tangga sasaran dengan informasi nama, umur, jenis kelamin, status sekolah dan pekerjaan anggota rumah tangga dan informasi tambahan tentang kondisi perumahan.

Jenis data yang dikumpulkan adalah:

1. Keterangan rumah tangga yang meliputi: luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekwensi membeli daging/ayam/susu, frekwensi makan, jumlah pakaian yang biasa dibeli, kemampuan berobat, lapangan pekerjaan utama, pendidikan kepala rumah tangga (KRT), kepemilikan aset.
2. Keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga (ART) yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, kepemilikan tanda pengenal, kecatatan, pendidikan, kegiatan ekonomi ART yang berumur 5 tahun dan lebih.

4.3. Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS11)

Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011) merupakan kegiatan nasional untuk memperoleh data rumah tangga dan keluarga menurut nama dan alamat dari 40 persen rumah tangga menengah ke bawah yang akan digunakan sebagai Basis Data Terpadu untuk program bantuan dan perlindungan sosial tahun 2012-2014.

Tujuan dilaksanakan kegiatan PPLS 2011 adalah :

Menghasilkan basis data terpadu Rumah Tangga dan Keluarga untuk sasaran berbagai program bantuan dan perlindungan sosial:

- a. Menurut nama dan alamat kepala rumah tangga
- b. Mencakup 40 persen kelompok masyarakat menengah bawah (masyarakat miskin dan rentan miskin), dengan persentase berbeda untuk setiap provinsi/kabupaten/kota sesuai intensitas kemiskinan.

- c. Memuat informasi *eligibilitas* program yang diluncurkan oleh Kementerian/Lembaga.

Jenis data yang dikumpulkan adalah:

1. Keterangan pokok rumah tangga, mencakup status penguasaan bangunan, luas lantai, jenis lantai, dinding terluas, atap terluas, sumber air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar/energi utama untuk memasak, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, kepemilikan aset, dan keikutsertaan berbagai program.
2. Keterangan sosial ekonomi ART yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, nomor urut keluarga, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, kecacatan, penyakit menahun/kronis, kehamilan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi ART yang berumur 5 tahun ke atas.

4.4. Basis Data Terpadu

Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 25,2 juta rumah tangga atau 96 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Sumber utama Basis Data Terpadu adalah hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli - Desember 2011 (PPLS 2011). Basis Data Terpadu saat ini dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). BDT adalah bagian dari *Open Government* Indonesia yang dapat diakses secara online di <http://bdt.tnp2k.go.id>.

Basis Data Terpadu digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari Basis Data Terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu

mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Basis Data Terpadu ini salah satu pemanfaatannya digunakan sebagai sumber data untuk menentukan Rumah Tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KPS dirancang sebagai penanda universal bagi RTS untuk mengakses program-program perlindungan sosial yang tersedia. Saat ini, dengan menggunakan KPS, rumah tangga penerima dapat mengakses Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Raskin. Angka kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2015 adalah 11,22 persen (28,59 juta penduduk). Sementara itu, rumah tangga penerima KPS adalah sebesar 15,5 juta rumah tangga miskin atau meliputi 65,6 juta penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa penerima KPS tidak hanya masyarakat miskin namun juga termasuk mereka yang rentan miskin.

4.5. Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT 2015)

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT 2015) adalah kegiatan nasional untuk melakukan perbaikan terhadap data karakteristik rumah tangga Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan sumber data lain yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari 2012-2014, misalnya rumah tangga pengganti penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel). Kegiatan PBDT 2015 perlu dilakukan karena selama periode 2011-2014 besar kemungkinan telah terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya penerima bantuan program perlindungan sosial. Kegiatan PBDT 2015 dilaksanakan berdasarkan Inpres No. 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Mekanisme pelaksanaan PBDT 2015 berbeda dengan tiga kegiatan sebelumnya yaitu dengan adanya keterlibatan masyarakat melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP merupakan forum diskusi antar perangkat daerah dan tokoh masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang

bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan rumah tangga dalam BDT yang dipandu oleh seorang fasilitator dan asisten fasilitator. Kegiatan FKP ini dilakukan sebelum pelaksanaan pendataan lengkap rumah tangga.

Informasi yang dikumpulkan pada pendataan rumah tangga adalah:

1. Nama dan alamat kepala rumah tangga.
2. Keterangan perumahan mencakup status penguasaan bangunan, penguasaan lahan, luas lantai, jenis lantai, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, sumber air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar/energi utama untuk memasak, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, kepemilikan aset, usaha mikro yang dimiliki, dan keikutsertaan berbagai program.
3. Keterangan sosial ekonomi setiap anggota rumah tangga (ART) yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, keluarga, jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, kecacatan, penyakit menahun/kronis, kehamilan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi ART.

4.6. Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan berbagai langkah konsolidasi yang diwujudkan dalam 3 instrumen utama penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Kluster I: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada

kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Paket ini diwujudkan dalam bentuk antara lain: beras miskin (raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan PKH (Program Keluarga Harapan).

2. Kluster II: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan. Contoh program kluster II adalah program PNPM Mandiri.

3. Kluster III: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Program ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting

dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Contoh program kluster III adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

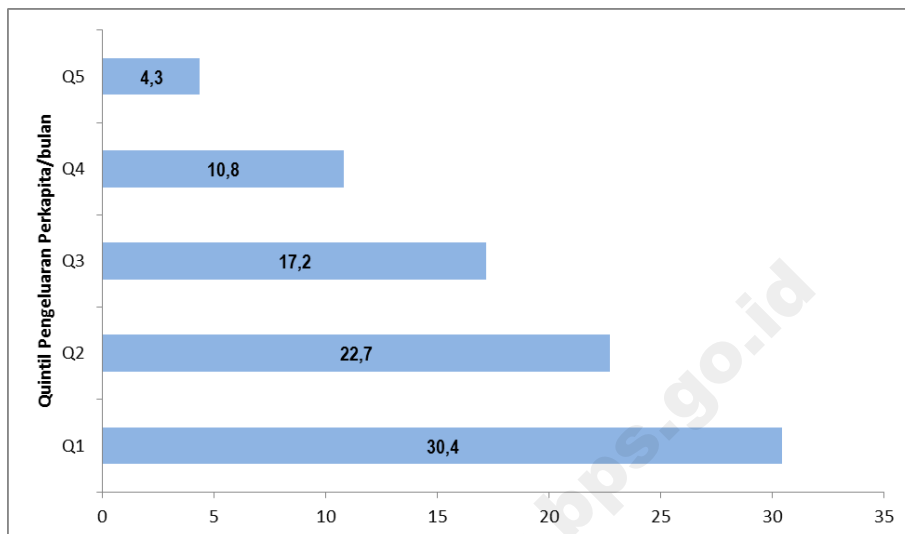
4. Kluster IV: Program Rumah Sangat Murah, Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Air Bersih Untuk Rakyat, Program Hemat Listrik dan Hemat Air, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.

4.6.1. Simpanan Keluarga Sejahtera

Simpanan Keluarga Sejahtera diberikan kepada keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera.

Program Simpanan Keluarga Sejahtera bagi pemegang KKS itu sendiri merupakan program pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 Juta Keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, sejumlah Rp. 200.000/Keluarga/Bulan. Untuk tahun 2014, dibayarkan sekaligus Rp. 400.000 untuk bulan November dan Desember. Program Simpanan Keluarga Sejahtera diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial lainnya. Saat ini, 1 juta keluarga diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian SIM Card, sedangkan 14,5 Juta keluarga diberikan dalam bentuk simpanan giro pos.

Gambar 4.1
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS)
Menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

Apabila dilihat distribusi rumah tangga yang menerima KPS/KKS pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa semakin tinggi kelompok quintilnya semakin rendah persentase rumah tangga yang menerima KPS/KKS. Rumah tangga pada kelompok 20 persen terbawah (quintil 1) memiliki persentase yang paling tinggi sebagai penerima KPS/KKS yaitu mencapai sekitar 30,4 persen rumah tangga, sedangkan pada rumah tangga kelompok 20 persen teratas (quintil 5) ternyata juga masih ada rumah tangga yang menerima program ini, yaitu hanya sekitar 4,3 persen.

4.6.2. Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin.

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Lebih jauh lagi, program raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan.

Rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin, adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

Tahun 2012, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5 juta RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin). Sedangkan untuk tahun 2013, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 15,5 juta RTS-PM. Jumlah RTS-PM Program Raskin nasional tahun 2014 adalah sebanyak 15.530.897 rumah tangga (tidak mengalami perubahan dari tahun 2013), yaitu rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda kepesertaannya, atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) untuk rumah tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).

Tabel 4.1 menyajikan distribusi persentase rumah tangga penerima beras miskin (raskin) menurut desil pengeluaran perkapita/bulan dan daerah. Dilihat dari desil pengeluaran tampak bahwa semakin tinggi desilnya semakin rendah persentase rumah tangga penerima raskin. Artinya persebaran rumah tangga penerima raskin didominasi oleh desil pengeluaran D1-D5 dengan persentase tiap desilnya lebih dari 10 persen.

Pola yang sama hampir berlaku baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tampak juga bahwa distribusi persentase rumah tangga penerima bantuan raskin yang tergolong D1-D5 di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Tabel 4.1 juga menunjukkan catatan yang perlu mendapat perhatian karena beberapa rumah tangga penerima raskin masih ditemukan pada rumah tangga pada desil pengeluaran kelompok atas (D9-D10) walaupun persentasenya kurang dari 10 persen.

Tabel 4.1
Persentase Rumah Tangga Penerima Beras Miskin (Raskin) Menurut Desil Pengeluaran dan Daerah, 2016

Desil Pengeluaran Perkapita/Bulan	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
D1	19,49	12,34	14,99
D2	16,75	11,75	13,61
D3	14,52	11,44	12,58
D4	13,04	11,13	11,84
D5	11,02	10,69	10,81
D6	9,16	10,14	9,78
D7	7,15	9,72	8,77
D8	5,24	9,09	7,66
D9	2,73	8,00	6,04
D10	0,89	5,70	3,91
Seluruh Rumah tangga	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas Maret 2016

Distribusi persentase rumah tangga per desil pengeluaran menurut daerah dan status penerimaan raskin disajikan pada Tabel 4.2. Secara keseluruhan rumah tangga penerima raskin tercatat sebesar 44,32 persen dari total rumah tangga, dimana terdapat 32,12 persen di perkotaan dan 57,15 persen di perdesaan. Rumah tangga penerima Raskin lebih banyak ditemukan di perdesaan daripada di perkotaan dan pola yang sama juga terjadi hampir di tiap-tiap desil pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi desil pengeluaran rumah tangga semakin kecil distribusi persentase rumah tangga yang menerima bantuan raskin, pola yang sama antar desil pengeluaran berlaku baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 4.2
Persentase Rumah Tangga Per Desil Pengeluaran Menurut Daerah dan
Status Penerimaan Beras Miskin (Raskin), 2016

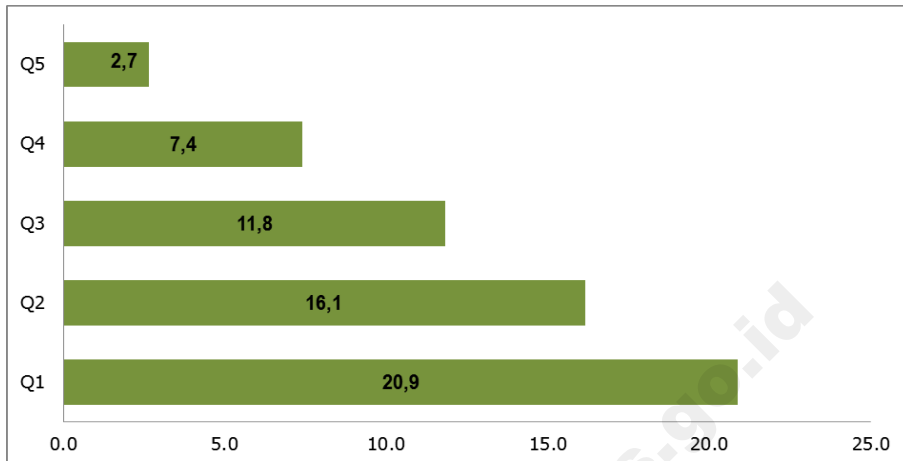
Desil Pengeluaran Perkapita/Bulan	Kota		Desa		Kota+Desa	
	Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
D1	62,58	37,42	70,49	29,51	66,44	33,56
D2	53,81	46,19	67,15	32,85	60,31	39,69
D3	46,65	53,35	65,35	34,65	55,77	44,23
D4	41,86	58,14	63,63	36,37	52,47	47,53
D5	35,38	64,62	61,10	38,90	47,92	52,08
D6	29,41	70,59	57,93	42,07	43,31	56,69
D7	22,96	77,04	55,58	44,42	38,85	61,15
D8	16,85	83,15	51,91	48,09	33,95	66,05
D9	8,78	91,22	45,73	54,27	26,78	73,22
D10	2,87	97,13	32,56	67,44	17,35	82,65
Seluruh Rumah Tangga	32,12	67,88	57,15	42,85	44,32	55,68

Sumber: Susenas Maret 2016

4.6.3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Kebijakan BSM bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Program ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena beasiswa bukan berdasarkan kemiskinan, melainkan berdasarkan prestasi.

Gambar 4.2
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) Menurut
Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

Bantuan ini memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan.

Apabila dilihat distribusi rumah tangga yang menerima BSM pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa semakin tinggi quintilnya semakin rendah persentase rumah tangga penerima BSM. Rumah tangga pada kelompok 20 persen terbawah (quintil 1) memiliki persentase yang paling tinggi sebagai penerima program BSM yaitu mencapai sekitar 20,9 persen rumah tangga, sedangkan pada rumah tangga kelompok 20 persen teratas (quintil 5) ternyata masih ada rumah tangga yang menerima program ini, yaitu hanya sekitar 2,7 persen.

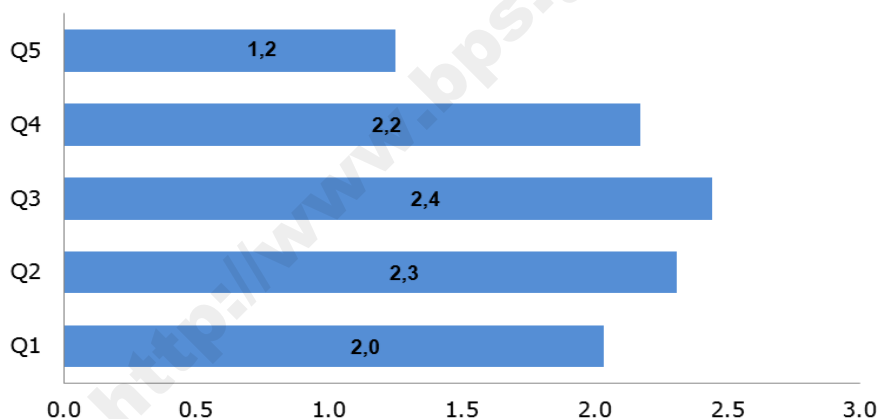
4.6.4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui

harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Gambar 4.3
Persentase Rumah Tangga yang Menerima PNPM
Menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

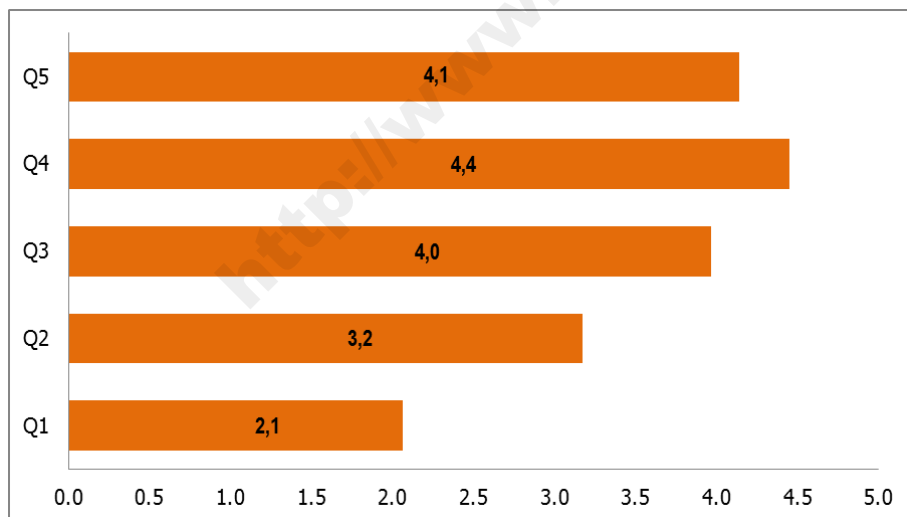
Gambar 4.3 menyajikan distribusi persentase rumah tangga yang menerima PNPM dalam kurun waktu setahun terakhir menurut desil pengeluaran perkapita/bulan. Dilihat dari desil pengeluaran tampak bahwa rumah tangga yang menerima PNPM hampir merata diseluruh kelompok quintil, kecuali pada quintil ke-5 yang memiliki persentase paling kecil yaitu sebesar 1,2 persen.

4.6.5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. Agunan pokok KUR adalah proyek/usaha yang dibiayai, namun pemerintah membantu menanggung melalui program peminjaman hingga maksimal 70 persen dari plafon kredit.

Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Gambar 4.4
Persentase Rumah Tangga yang Menerima KUR
Menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

Gambar 4.4 menyajikan distribusi persentase rumah tangga yang menerima KUR menurut kelompok quintil pengeluaran per kapita per bulan

yang mana dapat dilihat bahwa KUR hampir secara merata diterima pada semua kelompok quintil karena memang penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

<http://www.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

Perkembangan tingkat kemiskinan (jumlah dan persentase penduduk miskin) pada periode 1999-2016 tampak terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 1999-2005 dan kemudian meningkat pada tahun 2006. Selanjutnya pada periode tahun 2006-2016 menunjukkan penurunan trend tingkat kemiskinan. Pada periode ini jumlah penduduk miskin turun sebanyak 11,29 juta jiwa, yaitu dari 39,30 juta jiwa pada tahun 2006 menjadi 28,01 juta jiwa pada Maret 2016. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,75 persen pada tahun 2006 menjadi 10,86 persen pada Maret 2016.

Pada periode Maret 2015-Maret 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 1,97 pada keadaan Maret 2015 menjadi 1,94 pada keadaan Maret 2016. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama juga mengalami penurunan dari 0,54 menjadi 0,52.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2016, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan hanya 1,19 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,74. Sementara nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan 0,27 dan di daerah perdesaan mencapai 0,79, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan jauh lebih parah dari pada perkotaan.

Angka Gini Rasio pada periode 2002-2010 cenderung berfluktuasi. Fluktuasi angka Gini Rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Angka gini rasio pada tahun 2011 (0,410) meningkat dibanding dengan tahun 2010. Pada kurun 2010-2016, angka gini ratio menurun meski penurunnya lambat. Hal ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi perbaikan distribusi pengeluaran penduduk.

Pada periode 2002-2016 angka indeks Theil berfluktuasi. Indeks Theil ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok atas (penduduk kaya). Dalam periode 2012 sampai dengan 2016 angka indeks Theil menurun dari 0,3446 pada tahun 2012 menjadi 0,2935 pada tahun 2016. Indikator ketimpangan pengeluaran yang lain adalah Indeks-L. Angka Indeks-L ini lebih sensitif untuk melihat perubahan distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok bawah (penduduk miskin). Pada periode tahun 2012-2016 angka indeks Theil mengalami penurunan dari 0,2747 menjadi 0,2579.

Pada periode 2012-2016 ketimpangan pengeluaran terjadi perbaikan distribusi pengeluaran penduduk baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal ini ditunjukkan dengan angka Gini Rasio menurun dari 0,425 menjadi 0,410 di perkotaan sedangkan di perdesaan menurun dari 0,330 menjadi 0,327. Indeks Theil turun dari 0,3168 menjadi 0,3049 di daerah perkotaan dan untuk daerah perdesaan mengalami penurunan dari 0,2119 menjadi 0,1928. Demikian pula Indeks-L pada periode yang sama, sedikit menurun dari 0,2967 menjadi 0,2786 di daerah perkotaan dan untuk daerah perdesaan turun dari 0,1761 menjadi 0,1736 di perdesaan.

Menurut kriteria Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen pada tahun 2016 ketimpangan pengeluaran bergeser menjadi ketimpangan pengeluaran pada tingkat rendah (*low inequality*) yaitu porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah sebesar 17,02 persen, yang awalnya pada tahun 2013 berada pada tingkat (*moderate inequality*) yaitu pada angka 16,87 persen.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Analisis ini mengungkapkan beberapa profil rumah tangga miskin tahun 2016 yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep kemiskinan secara konseptual, antara lain:

- a. Jumlah anggota rumah tangga (*household size*): Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin (4,49 orang) lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin (3,71 orang).
- b. Kepala rumah tangga wanita: 16,12 persen rumah tangga miskin dikepalai oleh wanita dan 14,91 persen untuk rumah tangga tidak miskin.
- c. Sumber penghasilan utama kepala rumah tangga: 50,84 persen kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian.
- d. Status Pekerjaan: 46,18 persen kepala rumah tangga miskin berstatus berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar.
- e. Luas lantai rumah perkapita: 27,79 persen rumah tangga miskin menempati rumah dengan luas lantai per kapita maksimal 8 m².
- f. Jenis lantai rumah: 16,85 persen rumah tangga miskin menempati rumah dengan jenis lantai dari tanah.
- g. Jenis atap rumah: 4,97 persen rumah tangga miskin menempati rumah dengan jenis atap dari ijuk/rumbia; dan 0,34 persen dari jenis atap lainnya.
- h. Jenis dinding rumah: 17,10 persen rumah tangga miskin menempati rumah dengan jenis dinding dari bambu; dan 2,91 persen dari jenis dinding lainnya.
- i. Sumber penerangan rumah: 3,20 persen rumah tangga miskin menggunakan sumber penerangan rumah listrik non PLN; dan 7,63 persen dari bukan listrik.
- j. Akses terhadap air bersih: 46,17 persen rumah tangga miskin tidak memiliki akses terhadap air bersih.
- k. Fasilitas jamban: 30,82 persen rumah tangga miskin menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban.
- l. Status kepemilikan rumah: 87,62 persen rumah tangga miskin menempati rumah sendiri.

Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Dengan mengetahui profil kemiskinan, pengambil kebijakan dapat lebih memfokuskan program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut. Dengan demikian, berbagai kebijakan pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan ke depan dapat lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen/pengguna akan data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran dengan dilandasi semangat kebersamaan oleh semua pihak baik pemerintah, pengusaha/pelaku bisnis, dan masyarakat di sekitarnya untuk "Berbagi Rasa dan Berbagi Beban" dengan kaum miskin yang sangat membutuhkan pertolongan.

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2003, *Metodologi dan Profil Kemiskinan Tahun 2002*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2007, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2008, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2000a, *Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999 : Metode BPS. Seri Publikasi Susenas Mini 1999-Buku 1*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2000b, *Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonominya 1996-1999: Sebuah kajian sederhana Seri Publikasi Sosial Mini 1999-Buku 2*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2000c, *Penyempurnaan Metodologi Penghitungan Penduduk Miskin dan Profil Kemiskinan 1999*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2000d, *Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin : Metodologi Penentuan Rumah Tangga Miskin 2000*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2001, *Pelatihan Analisis Profil Kependudukan Hasil SP 2000, Pedoman Materi Teknis*, Laporan tidak dipublikasi, Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumba Timur, 2001a, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumba Timur 2000*, Waingapu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumba Timur, 2001b, *Karakteristik Penduduk Sumba Timur Hasil Sensus Penduduk 2000*, Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2001c, *Pendataan Rumah tangga Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan* (Makalah disampaikan pada *Poverty Mapping Workshop*, BPS, 11 Juni 2001), Banjarmasin : BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2001d, *Pendataan Rumah tangga Miskin Jawa Timur* (Makalah disampaikan pada *Poverty Mapping Workshop*, BPS, 11 Juni 2001), Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur.

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2001e, *Pendataan Rumah tangga Miskin di DKI Jakarta* (Makalah disampaikan pada *Poverty Mapping Workshop*, BPS, 11 Juni 2001), Jakarta : BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2002, *Indikator Fundamental Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute, 2002, *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Center for Economic and Social Studies (CESS)*, 2003, *Program Anti Kemiskinan di Indonesia : Pemetaan Informasi dan Kegiatan*, Jakarta : Penerbit *Center for Economic and Social Studies (CESS)*.
- Suyanto, Bagong, 1995, *Perangkap Kemiskinan : Problem & Strategi Pengentasannya*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Betke, Friedhelm, 2001, *The "Family-in-Focus" Approach: Developing Policy Oriented Monitoring and Analysis of Human Development in Indonesia*, Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Betke, Friedhelm, 2002, *Assesing Social Resielence Among Regencies and Communities in Indonesia*. Makalah untuk Diskusi Statistik Ketahanan Sosial di BPS. Jakarta: BPS
- BPS, Bappenas dan UNDP, 2001, *Laporan Pembangunan Manusia 2001 : Menuju Konsensus Baru : Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia*, Jakarta : BPS, Bappenas, UNDP.
- Haughton & Khandker, 2009, *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC. Halaman 181.
- Haughton, Jonathan, 2001, *The Impact of the East Asian Crisis : Poverty Analysis Using Panel Data*, Lecture notes prepared for the World Bank, Boston : Suffolk University and Beacon Hill Institute.
- Hasbullah, Jousairi, 2012, *Tangguh Dengan Statistik*. Bandung: Nuansa Cendikia. Hal 83.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2011, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Kementerian Sosial RI, 2012, *Pedoman Umum Keluarga Harapan (PKH)*, Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Ravallion, Martin, 1998, *Poverty Lines in Theory and Practice : Living Standards Measurement Study*, World Bank : Working Paper No. 13.
- Ritonga, Hamonangan dan Betke, Friedhelm, 2002, *Menuju Pendekatan Pemantauan Kesejahteraan Rakyat Yang Spesifik Daerah Dan Sayang Budaya*, Jakarta : BPS.

- Suseno Triyanto Widodo, 1990, *Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Thee Kian Wie, 1981, *Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, 2013, *Solusi Masalah Kepesertaan & Pemutakhiran Data Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)*, Jakarta: Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak.

<http://tnp2k.go.id/>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

Tabel L.1
Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Makanan,
Maret 2016

Jenis Komoditi	Satuan	Nilai (Rp/kap/bln)		Kandungan kalori	
		Kota	Desa	Kota	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Beras	Kg	43 721	62 407	762,45	882,24
2. Beras ketan	Kg	66	85	0,79	0,97
3. Jagung pipilan	Kg	147	895	3,51	19,20
4. Tepung terigu	Kg	752	884	15,02	14,39
5. Ketela pohon	Kg	636	923	11,17	13,83
6. Ketela rambat	Kg	426	2 441	5,75	20,10
7. Gaplek	Kg	10	66	0,35	2,62
8. Tongkol/Tuna/Cakalang	Kg	2 629	3 080	4,96	5,56
9. Kembung	Kg	1 644	1 076	2,63	1,58
10. Teri	Kg	903	955	1,35	1,23
11. Bandeng	Kg	1 218	1 220	2,68	2,36
12. Mujair	Kg	1 047	1 049	1,64	1,31
13. Daging sapi	Kg	378	189	0,36	0,16
14. Daging babi	Kg	190	721	0,72	2,36
15. Daging ayam ras	Kg	6 109	3 551	29,71	14,15
16. Daging ayam kampung	Kg	473	857	1,68	2,27
17. Tetelan	Kg	127	34	0,20	0,05
18. Telur ayam ras	Kg	7 415	6 388	19,71	13,41
19. Telur itik/manila	Butir	139	197	0,38	0,45
20. Susu kental manis	397 Gr	1 868	1 328	12,16	6,90
21. Susu bubuk	Kg	1 802	679	5,46	1,75
22. Bayam	Kg	1 234	1 467	1,24	1,16
23. Buncis	Kg	309	384	0,68	0,71
24. Kacang panjang	Kg	908	1 378	1,87	2,41
25. Tomat sayur	Ons	1 567	1 756	1,87	1,70
26. Daun ketela pohon	Kg	407	1 314	2,96	7,46
27. Nangka muda	Kg	108	168	0,39	0,56
28. Bawang merah	Ons	3 702	4 767	2,15	2,30
29. Cabe merah	Ons	3 148	3 293	0,14	0,11
30. Cabe rawit	Ons	2 302	3 385	0,44	0,59

Lanjutan Tabel L.1

Jenis Komoditi	Satuan	Nilai (Rp/kap/bln)		Kandungan kalori	
		Kota	Desa	Kota	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31. Kacang tanah tanpa kulit	Kg	154	201	1,90	2,06
32. Tahu	Kg	3 546	3 195	16,53	12,26
33. Tempe	Kg	3 658	3 529	27,66	21,92
34. Mangga	Kg	112	85	0,15	0,13
35. Salak	Kg	559	484	4,28	3,00
36. Pisang ambon	Kg	1 583	1 939	8,98	11,62
37. Pepaya	Kg	644	379	1,87	1,04
38. Minyak kelapa	Liter	158	381	4,32	8,17
39. Kelapa	Butir	922	1 745	13,10	26,96
40. Gula pasir	Ons	4 335	6 327	57,84	67,39
41. Gula merah	Ons	458	650	5,47	6,45
42. Teh	Ons	1 203	1 369	1,42	1,53
43. Kopi	Ons	3 512	3 729	15,19	14,06
44. Garam	Ons	515	818	0,00	0,00
45. Kemiri	Ons	397	436	2,94	2,83
46. Terasi/petis	Ons	481	590	1,19	1,28
47. Mie instan	80gr	335	308	3,75	3,11
48. Kerupuk	Ons	5 685	5 125	44,36	32,20
49. Roti manis	Potong	4 079	3 562	23,23	20,04
50. Kue kering	Ons	2 563	2 023	18,57	13,49
51. Kue basah	Buah	3 307	2 993	21,56	17,77
52. Rokok kretek filter	Batang	18 425	16 827	0,00	0,00
Jumlah	-	142 017	163 630	1 168,73	1 291,17
Setara 2100 kkalori	-	255 181	266 132		

Sumber: Susenas Maret 2016

Tabel L.2
Daftar Komoditi Kebutuhan Dasar Bukan Makanan,
Maret 2016

Jenis Komoditi	Kebutuhan dasar bukan makanan perkapita	
	Kota	Desa
(1)	(2)	(3)
1. Perumahan	35 578	25 985
2. Listrik	10 787	5 284
3. Air	1 986	493
4. Minyak tanah	516	252
5. Kayu Bakar	1 567	3 650
6. Obat nyamuk korek api baterai	1 843	1 585
7. Pos dan benda pos	726	475
8. Perlengkapan mandi	5 414	3 809
9. Barang kecantikan	2 974	2 000
10. Perawatan kulit/muka	1 700	1 175
11. Sabun cuci	1 992	2 634
12. Pendidikan	8 627	4 665
13. Kesehatan	2 621	2 281
14. Bahan pemeliharaan pakaian	1 194	507
15. Pemeliharaan kesehatan	145	52
16. Bensin	10 737	8 017
17. Angkutan	4 298	1 914
18. Foto	74	36
19. Pakaian jadi laki-laki dewasa	3 000	2 167
20. Pakaian jadi perempuan dewasa	3 311	2 382
21. Pakaian jadi anak-anak	2 828	2 263
22. Keperluan menjahit	121	79
23. Alas kaki	1 613	1 381
24. Tutup kepala	456	351
25. Handuk/ikat pinggang	128	113
26. Perlengkapan perabot rumah tangga	88	116
27. Perkakas rumah tangga	139	205
28. Alat dapur/makan	177	332
29. Arloji/jam	14	5
30. Tas	76	55
31. Mainan anak	207	128
32. Pajak Bumi Bangunan (PBB)	463	300
33. Pajak kendaraan bermotor	2 239	1 650
34. Pungutan lain	639	245
35. Perayaan hari raya agama	201	199
36. Upacara agama	867	730
Jumlah	109 346	77 514

Sumber: Susenas Maret 2016

CATATAN TEKNIS

Metode Penghitungan Kemiskinan

a. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

b. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2015 dengan jumlah sampel 300.000 rumah tangga. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

Untuk penimbang data Susenas (*weight*) yang digunakan mulai tahun 2011 merupakan *backcasting* dari penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010.

c. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per

kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara. Garis kemiskinan sementara adalah Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi yang bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen. Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp} \cdot r$$

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p .

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p .

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .

- V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .
 j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).
 p = Provinsi ke- p .

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}},$$

- K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p .
 \overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p .

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100,$$

- GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j , yaitu yang menghasilkan energi yang setara dengan 2100 kilokalori/kapita/ hari
 j = Daerah (perkotaan/perdesaan)
 p = Provinsi p

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPKKD 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

- $GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.
- V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).
- r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).
- k = Jenis komoditi non-makanan terpilih.
- j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).
- p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \times 100\%$$

- $\%PM_p$ = % Penduduk miskin di provinsi p.
- PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p.
- P_p = Jumlah penduduk di provinsi p.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

- PM_I = Penduduk miskin Indonesia.
- PM_p = Penduduk miskin provinsi p.
- n = Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PM_I = \frac{PM_I}{P_I} \times 100\%$$

$\%PM_I$ = Persentase penduduk miskin (secara nasional).

PM_p = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).

P_I = Jumlah penduduk Indonesia.

Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha,$$

α = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

- y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) dan jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2).

Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b},$$

A : jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar daripada X

N : jumlah penduduk total dan b : parameter yang nilainya antara 1 dan 2

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan pendapatan yang bersumber dari data Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat

ukuran untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L.

a. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

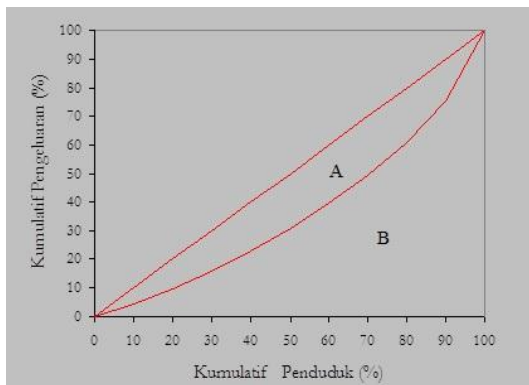
Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

- G = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)
 X_k = Proporsi kumulatif dari penduduk untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$ dengan $X_0 = 0$ dan $X_1 = 1$
 Y_k = Proporsi kumulatif dari pengeluaran untuk $k = 0, 1, 2, \dots, n$ dengan $Y_0 = 0$ dan $Y_1 = 1$

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.

Gambar 1. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorentz



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari kelompok termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.

- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (sub-group).

- Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a). Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat *ketimpangan pendapatan tinggi*.
- b). Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen,

maka dikatakan terdapat *ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah*.

- c). Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat *ketimpangan pendapatan rendah*.

c. Indeks Theil dan Indeks-L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas). Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan "*generalized entropy*". Rumus "*generalized entropy*" secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right],$$

\bar{y} adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran).

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya).

Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- $GE(1)$ disebut sebagai indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right),$$

- $GE(0)$, juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y):

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right)$$

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

